

*LAPORAN HASIL PENELITIAN*

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK**

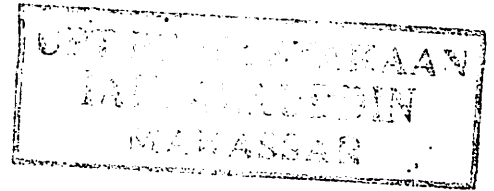
(Studi Korelasional antara Pemahaman dan Sikap dengan Partisipasi  
Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik di Kota Makassar)



Peneliti

Drs. MUKHTAR LUTFI, M.Pd.  
NIP. 150246414

DIBIAYAI OLEH :  
DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2002  
PUSAT PENELITIAN IAIN  
ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2002



**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

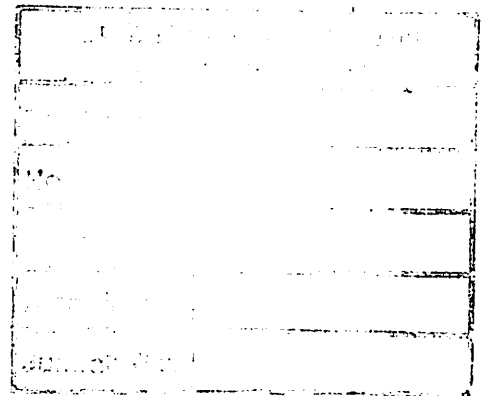
# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK**

**(Studi Korelasional antara Pemahaman dan Sikap dengan Partisipasi  
Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik di Kota Makassar)**



**Peneliti**

**Drs. MUKHTAR LUTFI, M.Pd.  
NIP. 150246414**



**DIBIYAI OLEH :  
DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2002  
PUSAT PENELITIAN IAIN  
ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2002**



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR  
PUSAT PENELITIAN**

Jl. Sultan Alauddin 63 Telp. 864931, 864928 Pesawat 209

---

## **KATA SAMBUTAN**

Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., oleh karena dengan Hidayat dan TaufikNya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik

IAIN Alauddin melalui Pusat Penelitian selalu berupaya agar para dosen senantiasa menaruh minat dalam melaksanakan penelitian. Sebab, penelitian sebagai dharma ke-2 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu terus digalakkan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan akan mengalami stagnasi sehingga tidak mampu menjawab tantangan kemajuan saraan dan kebutuhan pembangunan bangsa.

Kami mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada saudara peneliti atas jerih payahnya melaksanakan penelitian. Semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal.

Makassar, 1 Nopember 2002

Wassalam  
Kepala,

**Dr. Moh. Natsir Mahmud, M.A.**  
NIP. 150 217 170

**LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN  
Tahun 2002**

---

1. a. Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK (Studi Korelasional antara Pemahaman dan Sikap dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik di Kota Makassar)
- b. Macam Penelitian : ( ) Murni ( ) Terapan ( ) Pengembangan
2. Ketua Peneliti/Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs.Mukhtar Lutfi, M.Pd.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol. dan NIP. : Penata, III/d . 150246414
- d. Jabatan Sekarang : Sekretaris Jurusan
- e. Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Muamalah
- f. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Perwakafan
3. Jumlah Peneliti : 1(satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Makassar
5. Bila penelitian merupakan peningkatan kerjasama keimbangan, sebutkan .
- a. Nama Instansi : .....
- b. Alamat : .....
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan .....
7. Biaya : satu juta lima ratus ribu rupiah .....

MENGETAHUI  
KEPALA PUSAT  
PENELITIAN IAIN ALAUDDIN

Makassar, 1 Nopember 2002

KETUA PENELITI/  
PENELITI

Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA  
NIP. 150 217 170

  
Drs. Mukhtar lutfi, M.Pd.  
NIP. 150 246 414



**DEPARTEMEN AGAMA R.I.**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**PUSAT PENELITIAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864928-864931 (Fax. 864623)

---

**SURAT KETERANGAN**

No. PL./TL.01/02/2002

Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin Ujungpandang menerangkan bahwa :

Nama : Drs. Mukhtar lutfi, M.Pd.  
NIP : 150 246 414  
Pangkat Golongan : Penata, III/d  
Unit. Kerja : Fakultas Svari'ah IAIN Alauddin  
Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN  
TANAH MILIK (Studi Korelasional antara Pemahaman dan  
Sikap dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah  
Milik di Kota Makassar)

Yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian tahun 2002 dan telah diseminarkan pada seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 Nopember 2002  
Wassalam  
Kepala,

**Dr. Moh. Natsir Mahmud, MA.**  
NIP. 150 217 170

## ABSTRAK

**MUKHTAR LUTFI.** Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik (studi korelasional antara pemahaman dan sikap dengan partisipasi masyarakat terhadap perwakafan tanah milik di kota Makassar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, 2) hubungan antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, 3) hubungan antara pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

Populasi penelitian adalah semua masyarakat yang telah mewakafkan tanah miliknya dan terdaftar pada Kantor Departemen Agama di kota Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proporsional purposive random sampling. Semua data yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan seperangkat instrumen yang berbentuk tes dan kuisioner berbentuk skala, yang sebelumnya telah diujicobakan dan dinyatakan valid dan reliabel. Data diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan korelasi/regresi sederhana dan ganda.

Hasil temuan penelitian ini adalah: 1) terdapat hubungan signifikan antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik; 2) terdapat hubungan signifikan antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik; 3) terdapat hubungan signifikan antara pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

Berdasarkan temuan tersebut disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewakafkan tanah miliknya sebagai realisasi dari ajaran agama Islam, perlu peningkatan pemahaman tentang perwakafan dan dari sinilah akan terwujud sikap positif terhadap perwakafan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan perkenannya sehingga penelitian 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK (Studi Korelasional antara Pemahaman dan Sikap dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik di Kota Makassar)' dapat diselesaikan, meskipun disadari bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan dibuat di luar kesengajaan karena keterbatasan peneliti sebagai manusia biasa.

Ucapan terima kasih kepada rektor IAIN Alauddin, Dekan fakultas Syari'ah dan Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin serta seluruh staf atas fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan kepada peneliti, mudah-mudahan amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan pahala yang berlipat ganda, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang memerlukannya. Amin.

Makassar, 1 Nopember 2002

Wassalam

Peneliti,



**Drs. MUKHTAR LUTFI, M.Pd.**  
NIP. 150 246 414

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
IDENTITAS PENELITI.....	iii
SURAT KETERANGAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGAJUAN HIPOTESIS.....	 9
A. Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwakafan Tanah Milik....	9
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Perwakafan.....	13
C. Wakaf Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.....	35
D. Hak Milik Tanah.....	39
E. Sikap Masyarakat Terhadap Perwakafan.....	43
F. Kerangka Pemikiran/Konseptual.....	48
G. Pengajuan Hipotesis.....	52
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Variabel-Variabel Penelitian dan Pola Hubungan.....	53
C. Definisi Operasional Variabel.....	54

D. Waktu dan Tempat Penelitian.....	56
E. Populasi dan sampel.....	56
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data.....	75
 BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	 81
A. Deskripsi Data.....	81
B. Hasil Analisis Statistik Inferensial (Pengujian Hipotesis).....	87
C. Pembahasan.....	98
 BAB V. KESIMPULAN, INPLIKASI DAN SARAN.....	 105
A. Kesimpulan.....	105
B. Implikasi Penelitian.....	107
C. Saran Saran.....	111
 DAFTAR PUSTAKA.....	 113
LAMPIRAN LAMPIRAN .....	117

## DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>J u d u l</i>	<i>Halaman</i>
1.	Kisi-kisi Tes Pemahaman sesudah uji coba.....	60
2.	Kisi-Kisi Sikap sesudah Uji coba.....	62
3.	Kisi-Kisi skala Partisipasi terhadap Perwakafan Tanah Milik Uji coba....	63
4.	Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen.....	74
5.	Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	75
6	Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan.....	82
7.	Distribusi Frekuensi Sikap terhadap Perwakafan.....	84
8.	Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik.....	86
9.	Anava untuk Regresi Sederhana $Y = 42,362 + 2,709X_1$ .....	89
10.	Hasil Pengujian Keberartian Koefisien Korelasi Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan ( $X_1$ ) dngan Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik (Y).....	91
11.	Anava untuk Regresi Sederhana $Y = 42,362 + 2,709 X_2$ .....	93
12.	Hasil Pengujian Keberartian Koefisien Korelasi Sikap terhadap Perwakafan ( $X_2$ ) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik (Y).....	94
13.	Anava untuk Regresi Jamak $(Y) = 23,05 + 2,58X_1 + 0,28X_2$ .....	96
14.	Rangkuman Hasil Analisis Parsial.....	98



## DAFTAR GRAFIK

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Histogram Frekuensi Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan.....	83
2.	Histogram Frekuensi Sikap Masyarakat terhadap Perwakafan.....	85
3.	Histogram Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik.....	87
4.	Regresi Linear Sederhana $Y = 42,362 + 2,709X_1$ .....	90
5.	Regresi Linear Sederhana $Y = 16,903 + 2,704X_2$ .....	93

perwakafan, sikap berhubungan positif dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar ?
2. Apakah terdapat hubungan antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar ?
3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman dan sikap secara bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada hakekatnya tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, secara operasional tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

2. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman dan sikap dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama untuk:

1. Memberi sumbangan pemikiran dalam usaha penyempurnaan kepada petugas pembinaan pengelola tanah wakaf serta menjadi masukan bagi lembaga-lembaga atau institusi yang terkait dengan urusan perwakafan, demi terlaksananya sistem perwakafan tanah milik di kota Makassar, baik yang telah ada maupun yang mungkin diadakan dikemudian hari.
2. Menjadi acuan atau petunjuk terutama bagi pewakaf tanah milik, agar dapat memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.
3. Memberi sumbangan pemikiran dalam usaha penyempurnaan hukum perwakafan tanah milik di kota Makassar dan sekaligus memperkaya khasanah untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 'DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Dalam deskripsi teori ini, perhatian utama diarahkan kepada variabel pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah: (1) partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, (2) pemahaman masyarakat tentang perwakafan, (3) sikap masyarakat terhadap perwakafan.

#### **A. Partisipasi Masyarakat terhadap Perwakafan Tanah Milik,**

##### **1. Pengertian partisipasi**

Istilah partisipasi senantiasa dipakai dalam bahasa sehari-hari dikalangan masyarakat, terutama di lingkungan organisasi, perkumpulan atau kegiatan kelompok. Pengertian partisipasi berasal dari bahasa latin yakni "*participare*" yang bermakna peran serta atau menjadi terlibat.

Secara umum partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan ego atau diri sendiri, dimana keterlibatan bukan hanya secara fisik belaka, melainkan termasuk di dalamnya keterlibatan dalam bentuk dorongan, pikiran, perasaan dan kemauan (Marjono, 1985).

Ndraha (1987), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah; (1) partisipasi buah

pikiran, (2) partisipasi keterampilan, (3) Partisipasi tenaga, (4) partisipasi harta benda, dan (5) partisipasi uang

Di samping itu ada pula yang mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggungjawab untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis (1990), bahwa partisipasi dalam suatu perkumpulan sebagai suatu tingkat peran serta anggota melibatkan diri baik berupa tenaga maupun pikiran dalam perkumpulan tersebut.

Pengertian di atas, bahwa partisipasi tidak bisa terlepas dari peran serta seseorang dalam suatu kelompok. Dimana peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya Ndraha (1987), bahwa partisipasi adalah kesediaan seseorang untuk mendukung keberhasilan dari setiap program yang dicanangkan sesuai dengan kemampuan tanpa mengabaikan kepentingan pribadi. Dimana dukungan yang dimaksudkan bisa berbentuk material dan non material.

Berdasarkan tinjauan teoritis mengenai partisipasi masyarakat terhadap perwakafan tanah milik dalam penelitian ini adalah kesediaan seseorang untuk berperan serta, baik kegiatan fisik dan mental masyarakat, dengan jalan memberikan kontribusi baik yang berbentuk material maupun non material dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam berpartisipasi perwakafan tanah milik.

## **2. Bentuk-Bentuk Partisipasi**

Partisipasi terdiri atas dua bagian yaitu: (1) partisipasi bebas dan (2) partisipasi paksaan atau tekanan. Partisipasi bebas dimaksudkan sebagai partisipasi yang dilandaskan atas rasa kesukarelaan seseorang dalam berperan dalam suatu kegiatan. Seseorang berpartisipasi karena adanya perasaan senang tanpa adanya kekuatan lain di luar dirinya untuk ikut berperan serta. Bentuk berpartisipasi ini dibedakan lagi dalam dua bagian yaitu: (a) partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang tumbuh atas keyakinan dan pemahaman sendiri, dan (b) partisipasi yang terinduksi, yakni partisipasi yang tumbuh akibat penyuluhan dan bujukan. Sedangkan partisipasi paksaan atau tekanan adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan akibat adanya desakan atau kekuatan lain yang



memaksa untuk ikut berpartisipasi, meskipun yang dilakukannya tidak dilandasi oleh rasa senang dalam dirinya. Partisipasi dibedakan atas kesadaran dan kemauan sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan mempunyai arti bahwa keikutsertaan atau peran serta seseorang dalam suatu kegiatan atas pengarahan orang lain (Gulton, 1985).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa bentuk partisipasi itu terdiri atas partisipasi hakiki yang muncul dari diri individu dan partisipasi buatan yang muncul karena adanya stimulus dari luar individu. Untuk membentuk partisipasi hakiki pada diri individu, dibutuhkan cara-cara khusus yang melibatkan faktor psikologi. Partisipasi hakiki yang dimaksudkan adalah keikutsertaan seseorang terhadap kegiatan dengan didasari oleh kemauan hati nurani. Di samping partisipasi hakiki ada lagi bentuk partisipasi lain yang dibuat dengan partisipasi buatan. Partisipasi ini muncul karena adanya dorongan dari luar yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu kegiatan. Partisipasi buatan memiliki kelemahan karena memungkinkan timbulnya stres pada partisipasi.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini, partisipasi dalam perwakafan dimaksudkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perwakafan khususnya perwakafan tanah milik. Baik

partisipasi karena dilandasi oleh adanya kesadaran sendiri, maupun karena adanya dorongan dari luar, seperti dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang perwakafan tanah milik.

## **B. Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan**

Untuk lebih memudahkan dan mensistematiskan mengenai pemahaman masyarakat tentang perwakafan di kota Makasar, maka dalam deskripsi teori ini dijabarkan kedalam dua bagian yaitu; pengertian pemahaman dan wakaf menurut konsepsi Islam.

### **1. Pengertian Pemahaman**

Menurut Winkel (1989), bahwa pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya keadaan kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kalimat, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu seperti dalam grafik. Sejalan dengan itu, Dakir (1993) menyatakan bahwa pemahaman berarti suatu usaha untuk

melekatkan kesan sedemikian rupa sehingga tersimpan dan dapat diproduksi dan di gunakan.

Menurut Abdullah (1988), dalam pemahaman sedikitnya ada dua hal yang terkait dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kedua hal tersebut adalah mengetahui sekaligus menghayati. Mengetahui dan menghayati ini merupakan dua dimensi kognitif yaitu dimensi luar dan dalam. Dengan mempertemukan kedua dimensi tersebut memungkinkan seseorang untuk mendapat suatu pengertian atau pemahaman yang utuh.

Bloom dalam Sudjana (1992), membedakan pemahaman kedalam tiga teori yaitu: (1) pemahaman tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan, mulai terjemahan dalam arti yang sebenarnya sampai terjemahan menurut arti kiasannya; (2) pemahaman tingkat kedua adalah penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, menghubungkan beberapa bagian dari data atau fakta dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok; (3) pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat

memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa pemahaman merupakan suatu proses, perbuatan dan kemampuan untuk menangkap atau mengetahui dan menghayati makna, arti, dan tujuan dari pada perwakafan tanah milik. Oleh karena aspek pemahaman dalam taksonomi termasuk kawasan kognitif, sehingga untuk mengukurnya dapat dilakukan dengan menggunakan tes

## **2. Wakaf menurut Konsepsi Islam**

### **a) Pengertian Wakaf**

Menurut arti kata, wakaf berasal dari kata bahasa Arab "*Waqafa*" yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Menurut arti istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah (Sabiq, 1993 ; Basjir, 1977).

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *Waqafa-yaqifu waqfan*, yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan. (Yunus, 1972; Ali, 1988). Sejalan dengan itu, Ahmad (1986) mengemukakan bahwa

wakaf dari segi istilah hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, serta kekekalannya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkannya itu. Benda yang diwakafkan harus bersifat tanah lama dan tidak mudah musnah. Benda yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah dan berhenti dari peredaran, transaksi dengan tidak memperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh disedekahkan. Benda yang berhenti yang diperuntukkannya bagi kepentingan umum sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama (Djatnika, 1982: 15).

Haryono (1986), pengertian wakaf adalah pelepasan hak milik seorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya (buahnya) dipergunakan untuk kepentingan umum, pelepasan hak milik secara wakaf ini dinilai sebagai shadaqah jariyah (continue). Sejalan dengan itu dalam Ensiklopedi Islam Indonesia lebih menegaskan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah dalam kebaikan.

Menurut Abdurrahman (1990), wakaf adalah penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif terakhir akan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk sesuatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya. Lebih lanjut Abdurrahman (1994) menegaskan bahwa wakaf berarti menahan harta yang mempunyai daya tahan lama dipakai dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya atau mendedekahkannya untuk umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan tanah milik yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat di simpulkan bahwa wakaf merupakan suatu sistem pemindahan hak dengan penuh kerelaan menyerahkan hak miliknya dengan



ketentuan bahwa dapat kekal dan hasil/manfaatnya dipergunakan untuk keperluan amal kebaikan yang sesuai ketentuan hukum Islam.

## **b) Dasar Hukum wakaf**

Ada beberapa sumber yang menjadi dasar hukum tentang wakaf menurut konsepsi Islam, yaitu; *Pertama*; Al Qur'an sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah; *ke dua*, al Hadits dan yang *ketiga*, Ijtihad para ulama.

### **(1). Dasar Hukum Wakaf menurut Al-quran:**

- Surah al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...." (Depag, 1989 : 67).

- Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Terjemahnya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu memanfaatkan sebahagian harta kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Depag, 1990; 92)

## (2). Dasar Hukum Wakaf menurut Al Hadits antara lain:

Masalah perwakafan harta milik baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak (tanah) telah banyak di singgung dalam beberapa hadis antara lain:

- Hadits Abu Hurairah ra. Riwayat Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقط عمله إلا من ثلاثة أشياء، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: "Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya (Muslim, t.th ; 14).

- Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضاً، فأتى النبي صلى الله وسلم فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن أصبت أصلها وتصدق بها. فتصدق عمر أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يور الفقراء والقريبى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليه

يَا كُلُّ مَنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَطْعَمُ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. رواه البخاري.

Artinya: Dari Ibn. Umar ra. Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada nabi saw. seraya berkata: Saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi dari padanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya ?, Jawab Nabi: Bila mau tahanlah zat bendanya dan sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Sedang manfaat benda itu diberikan kepada fuqaha', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong (musafir). Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang makruf dan memakannya tanpa maksud memilikinya (Bukhari, 1992 ; 266).

### **(3). Sumber Hukum Wakaf menurut Para Mujtahid**

Ijtihad dimaksudkan sebagai hasil pemikiran para ulama Islam yang terkait dengan perwakafan, terdiri dari ijma' dan qiyash'. Hasil dari ijtihad merupakan kumpulan yurisprudensi hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab fiqh (fiqh ijtihadi). Fiqh ijtihadi tersebut adalah ijtihad para ulama untuk menerapkan hukum wakaf yang secara prinsipil (ushuli) tidak ada perbedaan pendapat mengenai wakaf. Tetapi secara cabang (far'i) ada perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut menyangkut apakah hak pemilikan wakaf yang diwakafkan terlepas atau tidak dari wakaf setelah mewakafkan tanah.

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	J u d u l	Halaman
1	Kisi-kisi Instrumen Tes Pemahaman Sebelum Uji coba .....	117
2	Kisi-kisi Instrumen Sikap Sebelum Uji Coba .....	118
3	Kisi-kisi Instrumen Partisipasi Sebelum uji Coba .....	119
4	Analisis Uji Coba Tes Pemahaman .....	120
5	Analisis Uji Coba Skala Sikap .....	122
6	Analisis Uji Coba Skala Partisipasi .....	124
7	Instrumen Penelitian .....	126
8	Data Mentah Hasil Penelitian .....	141
9	Hasil Analisis Data .....	143
10	Data Sebaran Populasi .....	149
11	Populasi Penduduk Kota Makassar.....	150
12	Peta Kota Makassar.....	151
13	Surat Izin Penelitian .....	156

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya hukum sebagai sesuatu hal yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik secara universal maupun secara individual. Agar kepentingan manusia terlindungi, pelaksanaan ketentuan hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak diwujudkan, akan tetapi kenyataan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum masih kurang menunjukkan kepiawaiannya.

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana, yang mana tidak disertai administrasi yang baik, ia cukup dilakukan dengan ikrar (pernyataan) atau isyarat dan disaksikan oleh dua orang. Kemudian penguasaan tanah diserahkan kepada nadzir untuk dipelihara dan dikelola sesuai dengan tujuan wakaf yang terkandung dalam ikrar wakaf. Oleh karena tidak ada administrasi yang baik, maka tidak ada bukti-bukti perwakafan, kedudukan tanah tidak jelas, sering dimiliki orang yang tidak berhak dan menjadi bahan sengketa, bahkan banyak yang dipersengketakan.

Berdasarkan hal di atas, apabila dilihat kenyataan hidup yang terjadi pada masyarakat agraris sudah barang tentu tanah

menempati peranan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani dan berladang, maka tanah merupakan tempat untuk menggantungkan kelangsungan hidup mereka, tanah menjadi modal utama baginya. Untuk penduduk perkotaan tanah bagi mereka tidak kalah pentingnya, baik sebagai tempat pemukiman maupun lokasi usaha, sehingga tidak mengherankan bila kasus-kasus hukum masih ramai diperdebatkan di meja sidang untuk memperebutkan keabsahan suatu tanah milik.

Berbagai jenis hak atas tanah bagi manusia dengan berbagai prosedur hukum mendukungnya. seperti halnya dengan tanah perwakafan yang telah diatur dalam Islam. Tanah sebagai sumber kehidupan manusia dapat pula menjadi sumber malapetaka bila hukum tidak ditegakkan, karena tuntutan kebutuhan atau kepentingan diantara berbagai pihak khususnya masyarakat di Kota Makassar, sehingga ada menguasai dan memiliki dengan menghalalkan berbagai macam cara. Akan tetapi sangat disayangkan kerena tuan-tuan tanah tersebut pada umumnya tidak terketuk pintu hatinya untuk mewakafkan sebahagian tanah miliknya, lebih menyedihkan



lagi adalah tanah yang telah di wakafkan oleh leluhur orang tua ataupun keluarganya digugat kembali.

Melihat pentingnya tanah dewasa ini, sehingga sering terjadi persengketaan di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan tanah wakaf. Hal ini berakibat pada adanya kecenderungan masyarakat enggan untuk mewakafkan tanah yang dimiliki. Untuk itu, perlu ada upaya meningkatkan kesadaran beragama, justru seharusnya sebagai seorang muslim memahami tentang wakaf dan bersikap positif terhadap perwakafan, sehingga kecenderungan berbuat sesuatu untuk mewakafkan tanah miliknya dan mendayagunakan harta wakaf sesuai petunjuk agama.

Karena terjadinya sengketa terkadang disebabkan orang yang tidak tahu memanfaatkan harta yang dikaruniakan oleh Allah swt. Bahkan mereka semakin bernaflu untuk menambah dan menumpuknya tanpa memperdulikan jalan yang ditempuh apakah halal atau haram, lebih parah lagi mereka sudah tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut, sebagaimana yang disyari'atkan oleh agama dengan jalan menafkahkan sebahagian hartanya kepada orang lain dengan jalan berwakaf.

Manusia memang tidak terlepas dari jiwa materialistis, dengan senantiasa berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin tanpa mengindahkan orang lain. Seperti halnya masyarakat di Kota Makassar sebahagian besar memeluk agama Islam dan banyaknya orang-orang kaya namun tidak mewakafkan tanah miliknya, mereka seakan tidak sadar atas harta yang mereka miliki dari hasil usahanya.

Melindungi dan mengatur tanah wakaf pada umumnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Pokok Agraria, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977, serta aturan pelaksanaan selanjutnya dengan tujuan utama, bahwa tanah wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan. Khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum Agraria harus menjamin adanya penyediaan tanah untuk keperluan suci lainnya sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mengandung prinsip-prinsip yang secara tegas mengatur hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Dalam peraturan pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk dalam pengertian wakaf yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya hanya kepada tanah milik.

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, telah terjadi suatu pembaharuan dibidang perwakafan tanah milik, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik telah diatur ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan dari pada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya diharapkan dengan berbagai peraturan dimaksud maka persoalan tentang perwakafan tanah milik ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya.

Dilihat dari segi hukum perwakafan tanah milik berasal dari hukum Islam yang diperlakukan sebagai hukum Nasional (Azhar Basyir, 1977:16), sebagaimana dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang ketentuan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), dimana terdapat pasal yang menunjuk bahwa perwakafan tanah milik akan

diatur dengan suatu peraturan pemerintah. Hal ini tercantum dalam pasal 49 ayat (3) UUPA 1960 yang berbunyi bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut baru dikeluarkan tujuh belas tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 berwujud Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka lembaga wakaf tidak lagi di pandang sebagai mutu lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam semata, akan tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai suatu lembaga formal dalam hukum Agraria Nasional, sehingga segala sesuatunya tidak hanya memenuhi segala persyaratan yang diatur dan di tentukan oleh ajaran Islam semata, melainkan juga harus memenuhi segala macam persyaratan formal yang ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan dikemudian hari (Abdurrahman, 1990 :3).

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang permasalahan pokok yaitu apakah pemahaman masyarakat tentang

Mengenai terlepas atau tidaknya pemilikan tanah setelah seseorang (wakif) mewakafkan tanahnya menurut madzab Imam Syafii (Djatnika, 1982 : 7), bahwa akad (perjanjian) wakaf termasuk "*akad tabarru*" (pemindahan hak milik kepada orang lain tanpa ganti atau tukar) seperti *hibah* (pemberian).

Apabila perwakafan telah dilaksanakan dengan syarat rukunnya, orang yang wakaf tidak boleh memindahtangankan benda wakaf tersebut seperti meminjamkan, memberikan dan memperjual belikan, oleh karena itu Imam Safii mendefinisikan wakaf sebagai berikut: "Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap miliknya, sehingga bila kita kaitkan dengan rumusan dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 adalah sesuai dengan pendirian madzab Imam Syafii tersebut yang berbunyi "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam

Mengenai terlepas atau tidaknya kepemilikan tanah setelah seseorang (wakif) mewakafkan tanahnya menurut mazhab Imam Syafi'i dalam Jatnika (1982), bahwa akad (perjanjian) wakaf termasuk akad tabarruj (pemindahan hak milik kepada orang lain tanpa ganti atau tukar) seperti hibah (pemberian).

Apabila perwakafan telah dilaksanakan dengan syarat rukunnya, orang yang wakaf tidak boleh memindahtangankan benda wakaf tersebut seperti meminjamkan, memberikan dan memperjualbelikan. Oleh karena itu Imam Syafi'i dalam Jatnika (1990) memberi definisi wakaf "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap miliknya".

Sebagaimana para mujtahidin menjelaskan tentang dasar hukum wakaf menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad dalam Hasybi as-Shiddiqy (1970), menyatakan bahwa wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian umum ayat maupun hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus di zaman Rasulullah saw. Dalil yang dijadikan sebagai dasar atau sandaran hukum seperti yang telah disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an sebelumnya (Alabij, 1989).

Sebagaimana diketahui bahwa para puqaha telah menelusuri betapa pentingnya perwakafan dan peranannya dalam pembangunan agama, sehingga mereka dapat mengambil suatu ketetapan tentang dalil-dalil yang menganjurkan wakaf.

Dalam memahami beberapa ayat yang telah disebutkan dalam nash al-Qur'an, bahwa berbuat baiklah kamu dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya, karena sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik, artinya akan diberikan pahala kepada mereka.

Lain halnya Bahry (1983) dalam menafsirkan ayat dalam surah al-Anfal ayat 2-3 bahwa:

Ciri-ciri orang yang beriman adalah (1) hatinya gemetar manakala sifat Allah yang Maha Kuasa disebutkan, (2) bertambah imannya manakala ia mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an, (3) kepada Tuhan ia bertawakkal dan (4) selalu mendirikan shalat, (5) dengan sukarela menafkahkan sebahagian dari reski yang dikaruniakan Allah kepadanya, ia pemurah tidak bakhil dan tidak pula boros.

Selanjutnya Abu Hanifah dalam Jatnika (1990) menjelaskan bahwa:

Wakif tidak terlepas pemilikannya kecuali dalam tiga hal: (a) wakaf telah ditetapkan oleh hakim, sehingga dengan ketetapan hakim bahwa tanah telah diwakafkan, wakif tidak lagi memiliki dan tidak boleh memindahtangankan (mentransaksikan), (b) mewakafkan dengan bentuk wasiat dengan menyatakan tanahku ini diwakafkan setelah saya meninggal dunia, (c) wakaf tanah tersebut untuk masjid.

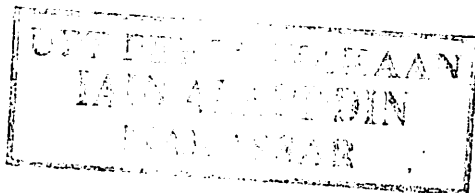
**c) Syarat-Syarat Wakaf dan Macam Harta yang dapat diwakafkan.**

Syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta menurut Muh. Daud Ali (1988) adalah: Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya, tujuannya harus jelas, wakaf harus dilaksanakan, wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

Perwakafan disyaratkan terpenuhinya rukun atau unsur wakaf, yaitu: (1) wakif atau orang yang memberikan wakaf dengan syarat, beragama Islam, akil baliq, cakap bertindak hukum, berakal sehat dan tidak ada paksaan, (2) benda yang diwakafkan harus bernilai dan tahan lama, (3) wakaf bertujuan untuk beribadah kepada Allah, maksud tersebut harus jelas dan dinyatakan dengan suatu pernyataan atau *ikrar*, (4) Ikrar (*shighat*) pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan (Alabij, 1997).

Dari beberapa syarat di atas, dijelaskan bahwa, (1) jangka waktu tidak terbatas, sebab amalan wakaf berlaku untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu tertentu, dengan demikian apabila seseorang mewakafkan tanahnya dengan





waktu tertentu, maka wakafnya dipandang tidak sah, (2) wakaf itu harus jelas tujuannya, yakni seseorang yang mewakafkan harta bendanya harus menjelaskan kepada siapa ditujukan dan untuk apa wakaf tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekaburan bagi si penerima wakaf, (3) wakaf terlaksana setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebabnya adalah ikrar wakif itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dengan wakaf yang bersangkutan, (4) wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya. Seiring dengan itu Sudarsono (1992), menyatakan bahwa unsur dan syarat-syarat wakaf adalah orang yang berwakaf (wakif), benda yang diwakafkan (mauquf), penerima wakaf (mauquf alaihi), lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf (shiqhat).

Selanjutnya dalam PP No 28/1977 tanggal 17 Mei 1977 dijelaskan bahwa wakif adalah orang atau orang-orang atau badan-badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. (Departemen Agama R.I, 1991/1992). Demikian pula dalam

kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 20 disebutkan bahwa wakif adalah seorang individu ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (Abdurrahman, 1992). Bagi orang atau orang-orang yang mewakafkan harta benda miliknya disyaratkan sebagai berikut:

*Syarat pertama* (cakap, benar-benar memiliki harta, tidak mencabut kembali wakafnya, tidak terpaksa, tujuannya jelas), Selanjutnya Abdurrahman (1992), menjelaskan:

- (1) Cakap bertindak dalam hukum Islam memberikan dua pengertian yaitu baligh dan rasyid. Pengertian baligh menitik beratkan pada usia, sedangkan pengertian rasyid menunjuk pada kematangan pertimbangan akal. Jadi untuk kecakapan melakukan tindakan tabaru (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang.
- (2). Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Mengenai hal ini harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Kalau ada beban itu harus diangkat lebih dahulu agar dengan tindakannya itu wakif tidak merugikan orang lain. Jika seorang wakif berada dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan hartanya, perbuatannya itu dapat di

analogikan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya. Kecuali kalau perwakafan itu disetujui sepenuhnya oleh ahli warisnya. Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan kedalam hak miliknya.

- (3) Wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya. Hal ini dimaksudkan untuk menahan manfaat benda yang diwakafkan.
- (4). Wakif yang mewakafkan hartanya tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, jadi manakala kita mendapat suatu wakaf yang wakifnya merasa dipaksa atau ada pihak lain yang memaksakan kehendak kepada wakif untuk mewakafkan hartanya, maka perbuatan wakif itu dianggap tidak sah.
- (5). Tujuan mewakafkan harta dari seorang wakif harus jelas, seperti dalam mendirikan tempat ibadah, menolong fakir miskin, untuk keperluan keluarga sendiri serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Dalam kaitan ini,

tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif harus seorang muslim, oleh karena itu orang non muslim pun dapat melakukan wakaf sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Rofiq, 1995). Selain itu, sifat wakaf yang tabaru (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan), namun demikian ketentuan-ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.

*Syarat kedua* yang perlu dipenuhi yaitu "*Mauquf*" atau benda yang diwakafkan. Syarat-syarat harta benda yang harus diwakafkan dan harus dipenuhi adalah; (a) benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang; (b). benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum. (c) hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa, (d) benda wakaf itu dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar. (e)

benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan (Rofiq, 1995).

Jadi perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam, berhubung dengan itu maka tanah yang hendak diwakafkan harus merupakan tanah hak milik yang bebas dari segala perkara dan betul betul merupakan milik yang tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan. Olehnya tanah yang mengandung pembebanan seperti sengketa tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu.

*Syarat Ketiga* yaitu “ *Mauquf alaih*” atau tujuan wakaf. Dalam peraturan pemerintah tidak disebutkan secara rinci mengenai tujuan wakaf, karena tujuan wakaf sudah dianggap jelas, tetapi cara melestarikan tujuan dan cara pengelolaannya dilakukan oleh pengurus wakaf supaya manfaatnya dapat kekal dan dinikmati kepentingan umum (masyarakat) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

*Syarat Keempat* yaitu *Sighat* atau *Ikrar/pernyataan wakaf*, pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Lebih lanjut (Rofiq, 1995 : 497-498) pelaksanaan wakaf baik dilakukan dengan lisan atau tulisan harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat sahnya

pernyataan wakaf (sighat) yang perlu diperhatikan adalah: (1) tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam, (2) jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. (3) tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah. (4) kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yakni baru terlaksana setelah wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.

Ikrar wakaf tersebut merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak) sehingga tidak diperlukan adanya kabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa akan datang. Namun demikian, karena tujuan wakaf yang hendak melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nadzir sebagai pengelola wakaf sangat di perlukan.

Untuk menjadi *Nadzir* atau pengelola wakaf, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, (2) memiliki kreativitas, (3)

beragama Islam, (4) sehat jasmani dan rohani, (5) sudah dewasa, (6) tidak berada di bawah pengampunan, dan (7) bertempat tinggal di kecamatan, tempat letak benda yang diwakafkannya.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perwakafan itu dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf yang telah ditentukan. Apabila semua atau sebahagian rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan wakaf dianggap tidak sah, untuk itu perlu adanya rukun dan syarat -syarat wakaf. Abdurrahman (1992) lebih menegaskan lagi bahwa syarat-syarat dan unsur-unsur wakaf adalah:

- Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang telah dewasa dan sehat akalnya.
- Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
- Tanpa paksaan dari pihak lain (berkehendak sendiri)
- Mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Sejalan dengan hal di atas Al-Alabij (1997), syarat-syarat wakaf: (1) barang atau benda yang diwakafkan itu tidak rusak atau habis ketika di ambil manfaatnya, (2) kepunyaan orang yang berwakaf (wakif), benda yang bercampur haknya dengan orang lainpun boleh diwakafkan seperti halnya boleh di hibahkan atau di sewakan, (3) bukan barang haram atau najis.

Meskipun para ulama dan ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun semuanya sepakat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Wakaf sebagai suatu lembaga , mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun pembentuknya. Tanpa ada unsur atau rukun itu, maka wakaf tidak dapat berdiri.

#### **d) Macam-macam wakaf**

Wakaf adalah merupakan suatu pranata dalam hukum Islam, dimana dalam beberapa literatur menyebutkan adanya berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam dimana pembedanya didasarkan atas beberapa kriteria. Menurut Ali (1988), wakaf ada dua macam berdasarkan tujuan wakaf yaitu; (1) wakaf keluarga atau wakaf ahli yang juga disebut wakaf



husus yaitu wakaf yang seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain, (2) wakaf umum (wakaf khairi) adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum dimana sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, pekuburan dan sebagainya. Sedangkan menurut Faisal Haq dan Saeful Anam (1993), wakaf ditinjau dari segi bendanya terbagi dua yaitu: (1) benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan bangunan, (2) benda bergerak seperti mobil, sepeda, motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya. Benda-benda yang disebutkan nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Apabila benda-benda tersebut sudah tidak dapat dipertahankan maka selésailah wakaf kecuali benda-benda itu ditukar atau diganti dengan benda yang baru.

#### **e) Fungsi dan Tujuan wakaf**

Mengenai fungsi dan tujuan wakaf adalah mengekalkan harta benda, sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya (Ali, t. th). Karena itu dengan wakaf ini, maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan,

apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal menjadi sasaran utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan wakaf yaitu; (a) merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah dan hasilnya merupakan amal jariyah selama barang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. (b) memberi darma bakti kepada masyarakat umum untuk kepentingan sosial dan pembinaan pembangunan keagamaan lainnya. Kedua sasaran tersebut merupakan ciri has tuntutan syari'at Islam, dimana sasaran utama merupakan tujuan dari segala amal ibadah dan untuk mendapatkan manfaat dari pada harta benda yang dimiliki, maka harus melalui sasaran yang kedua di atas. Karenanya sasaran pencapaian fungsi dan tujuan wakaf tersebut tidak dapat dicapai apabila pihak pengelola wakaf (*nadzir*) tidak melaksanakan secara patut fungsi dan kedudukannya.

Fungsi dan tujuan wakaf telah ditegaskan dalam firman Allah (QS:3;92). Ayat ini merupakan salah satu motivasi terhadap penyempurnaan ibadah kepada Tuhan, sehingga dikatakannya bahwa apabila kamu belum menafkahkan

sebagian dari harta yang kamu cintai, maka nilai ibadahmu belum sempurna (al-Mahally, 1990).

Lain halnya Nasution (t.th : 40):

Membelanjakan harta itu pada hakekatnya adalah realisasi dari suatu perbuatan kebajikan, dimana kebajikan itu menjadi salah satu tujuan yang penting dari ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya ada dua tujuan yang dapat dicapai dengan wakaf yaitu agar memperoleh keridhaan Allah swt., dan memberikan pengayoman sosial dan dharma bakti kepada masyarakat serta menyantuni umat Islam yang memerlukan pertolongan. Disamping dengan pemahaman masyarakat terhadap perwakafan dimaksudkan suatu proses kemampuan untuk merealisasikan, mengetahui dan menghayati makna, arti dan tujuan dari pada perwakafan.

### **3. Wakaf Menurut Perundang -Undangan di Indonesia**

Institusi perwakafan di Indonesia berasal dari hukum Islam, yang telah dikenal bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia. Islam telah masuk di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh Masehi, dan pada saat itu hukum wakaf telah terdapat di seluruh Nusantara, yaitu mulai dari Aceh, Gayo, Tapanul, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo (Sulawesi), Lombok, Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Barat. Harta benda yang diwakafkan ada yang tidak bergerak, seperti sawah, kebun, dan ada pula harta benda bergerak seperti mobil, motor dan sebagainya (Djatnika, 1982).

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia yaitu sejak abad ke tujuh Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan yang tertulis mengaturnya, namun setelah Indonesia merdeka lepas dari penjajahan Belanda, sebahagian hukum Islam termasuk hukum wakaf telah menjadi hukum Nasional, karena hukum wakaf telah diatur dengan Undang Undang Pokok Agraria dan Undang Undang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977.

Namun demikian, karena hukum tersebut telah diterima sebagai hukum adat, maka hukum wakaf Islam diperlakukan sebagai hukum positif. sehingga di negara Republik Indonesia secara hukum sudah ada beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perwakafan seperti di kemukakan oleh Alabij (1997) antara lain:

- UU No.5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, bahwa Perwakafan

tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah. Termasuk pendaftaran tanah wakaf.
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963 tanggal 19 juni 1963, tentang penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
- Peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 17 mei 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Tahun 1977, tanggal 26 Nopember 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 10 januari 1978 tentang Perwakafan tanah milik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk Badan-Badan Hukum tertentu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978.
- Instruksi Bersama menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang

- pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
  - Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di seluruh Indonesia, tentang pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. (PPAIW).
  - Instruksi Menteri Agama No.3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusann Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
  - Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/II/5Ed/14/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf yang bebas materai, dan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai dan berapa besar bea materainya.
  - Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Pebruari kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia tentang Pendaftaran

perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.

-Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D.II/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang petunjuk Pemberian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik. .

#### **D. Hak Milik Tanah**

##### **1. Pengertian Tanah**

Kamus Bahasa Indonesia (1990 :490) menyatakan:

Tanah adalah (1) permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. (2) keadaan bumi di suatu tempat. (3) Permukaan bumi yang diberi batas (4) bahan-bahan dari bumi dan bumi sebagai lahan sesuatu (pasir, cadas, napal).

Menurut Mulyani (1991 : 22) bahwa:

Tanah merupakan suatu lapisan sistem kerak bumi yang tidak pada dalam ketebalam beragam berbeda dengan bahan-bahan di bawahnya yang tidak baku dalam hal warna, bangunan fisik, struktur susunan kimiawi, sifat biologi, proses kimia ataupun reaksi.

Pengertian di atas, memberikan pemahaman bahwa tanah memiliki sifat yang menggambarkan keadaan dalam tanah yang dikandung di dalamnya untuk dapat di olah dan dimanfaatkan. Adapun pengertian lain oleh A.P. Parlindungan (1987: 14) tanah itu sendiri hanya merupakan salah satu dari bumi di samping tanah di bumi ataupun di tubuh bumi itu sendiri.

Hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ada sifat yang melekat pada tanah, dan sudah memberi pemahaman yang jelas bahwa dalam penggunaannya haruslah sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diembannya, yakni tidak boleh bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh tanah. Lain halnya Jhon salindeho (1993 : 23) bahwa:

“Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia ia harus sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan goncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan”.

Pengertian tanah yang dikemukakan di atas, dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensinya. Sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis, disamping sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi seseorang atau kelompok, akan tetapi bermanfaat pula bagi pembangunan kebutuhan umat. Dengan demikian tanah itu adalah tidak bergerak sehingga secara fisik tidak dapat diserahkan, dipindahkan, dan di bawah sebagai tanah bersifat abadi.

Walaupun ada pengertian tanah tersebut di atas, tetapi ia harus dilihat segi yuridis. Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa:



...hak atas tanah permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian yang boleh mempunyai hak-hak atas tanah adalah tanah yang ada di atas permukaan bumi saja, sedangkan yang ada di dalam perut bumi adalah tetap dikuasai oleh negara untuk kepentingan orang banyak.

## **2. Kepemilikan Tanah**

Menurut Wiradi (1994 : 29) bahwa:

Kepemilikan tanah menunjukkan pada penguasaan formal, sedangkan penguasaan tanah menunjukkan pada penguasaan efektif, misalnya jika sebidang tanah disewakan kepada orang lain, jika seseorang menggarap tanah miliknya sendiri 2 hektar, lalu menggarap juga 3 hektar yang disewakan dari orang lain, maka ia menguasai 5 hektar.

Disamping itu perlu juga diperhatikan Rescoe Pound (1982: :137) yang menyatakan Sejarah tentang hak milik pada umumnya tidak dikenal dalam hukum, hak milik pribadi atau perorangan atas benda apa pun sebab semua benda dianggap milik bersama.

Dalam pasal 20 berhubungan dengan pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria, dalam R. Subekti (1976 : 459) yang menyangkut tentang hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial.

Turun temurun dimaksudkan di sini, adalah bahwa hak milik itu dapat terus menerus diturunkan kepada ahli warisnya setiap pemegang, sedangkan istilah terkuat dan terpenuh dimaksudkan adalah untuk membedakan dengan hak-hak lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah serta hak-hak lainnya, sehingga dapat menunjukkan dari semua hak-hak atas tanah yang telah disebutkan itu dapat dimiliki orang, akan tetapi hak miliklah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh.

Dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata juga terdapat pengertian hak milik seperti pada pasal 570 disebutkan:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak orang lain.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah pada awalnya bersifat komunal lalu berkembang menjadi penguasaan perseorangan dan akhirnya menjadi pemilikan. Apabila tanah statusnya menjadi hak milik berarti menunjukkan penguasaan formal, sedangkan penguasaan efektif menunjukkan penguasaan

obyektif. Dengan demikian pemilikan tanah belum tentu pemanfaatannya efektif akan tetapi penguasaan tanah secara obyektif pemanfaatannya efektif.

## **E. Sikap Masyarakat terhadap Perwakafan**

### **1. Pengertian Sikap**

Definisi sikap telah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi dan pendidikan. sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung (faporabel) maupun perasaan tidak mendukung (infaforabel) terhadap Obyek psikologis". (Thurustone 1928 dan Rensis Likert 1932 dalam Azwar 1999: 4) "sikap" (attitude) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik dan buruk terhadap obyek tertentu (Dalyono, 1977: 216). Selanjutnya sikap dapat pula di depinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak laku tertentu kalau ia menghadapi rangsangan tertentu. Sikap ini bisa terjadi terhadap benda, situasi, orang kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat di sekitar manusia. Mengenai arah kecenderungan sikap dapat positif atau negatif. Dalam sikap positif maka kecenderungannya adalah menyenangkan, menyetujui, mendekati, memperhatikan, mengharapakan sesuatu yang baik dari obyek. Akan tetapi sebaliknya dalam sikap negatif terdapat kecenderungan

menjauhi, tidak setuju, membenci, tidak peduli, dan menghindari masalah tertentu (Sarwono, 1995).

Dengan memahami sikap seseorang, pada umumnya akan dapat dipahami tingkah lakunya, karena tingkah laku seseorang akan dilatarbelakangi oleh sikapnya. Sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. (Walgito, 1980). Sehingga sikap ini menyangkut kesiapan individu untuk bereaksi terhadap obyek tertentu berdasarkan konsep-konsep penilaian positif negatif. Sikap seseorang terhadap obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorabel) maupun perasaan tidak mendukung (tak favorabel) obyek tersebut. Sikap selalu terarah kepada obyek yang terdapat dalam lingkungan psikologis individu yang bersangkutan, sehingga sikap itu terbatas sesuai dengan lingkungan psikologis individu tersebut (Natawidjaja, 1992).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan tingkah laku ke arah positif atau negatif terhadap suatu obyek atau stimulus. Dengan demikian sikap masyarakat terhadap perwakafan tanah milik di Kota Makassar dapat diartikan sebagai kecenderungan tindakan atau perilaku baik secara positif maupun negatif terhadap perwakafan tanah milik itu sendiri.

## 2. Komponen Komponen Pembentukan/Perubahan Sikap

Sikap dilihat dari strukturnya, terdiri atas komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif berupa apa yang dipercayai oleh subyek pemilik sikap. Komponen afektif merupakan komponen perasaan yang menyangkut aspek emosional. Dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subyek (Azwar, 1998).

Selanjutnya Mar'at (1982), menyatakan sikap memiliki tiga komponen, yaitu: *Pertama*, komponen kognisi yang berhubungan dengan kepercayaan, ide, dan konsep, *kedua* komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang, dan *ketiga* komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Menurut Azwar (1998) dalam interaksi sosial terjadi saling berhubungan diantara individu yang satu dengan yang lain. Terjadi hubungan timbal balik turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Interaksi sosial ini meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis sekelilingnya. Dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya.

Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah: (1) pengalaman pribadi, (2) kebudayaan, (3) orang lain yang dianggap penting, (4) media massa, (5) institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, (6) faktor-faktor emosi dalam diri individu.

Dengan demikian, dipahami bahwa pengalaman seseorang terhadap suatu obyek tertentu, menyebabkan sikapnya akan lebih positif atau negatif terhadap suatu obyek tertentu, pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

Kebudayaan di tempat seseorang dibesarkan, mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Apabila seseorang hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin kita akan mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi. Tanpa disadari bahwa kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh terhadap berbagai masalah. Demikian pula media massa sebagai

sarana komunikasi mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Lembaga agama sebagai sistem mempunyai hubungan dalam pertumbuhan sikap. Karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya, faktor emosional juga dapat mempengaruhi sikap. Karena terkadang bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara, dan pada akhirnya akan segera berlalu ketika frustrasi telah hilang .

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah di simpulkan bahwa sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai unsur. Demikian pula dengan sikap masyarakat terhadap perwakafan tanah milik tentu dipengaruhi oleh beberapa unsur tersebut di atas.

## **F. Kerangka Pemikiran/Konseptual**

### **1. Hubungan antara Pemahaman dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik**

Pemahaman merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya pemahaman adalah kemampuan seseorang menangkap makna dan arti dari suatu informasi yang diterima. Adanya suatu informasi yang diterima oleh seseorang akan merubah perilakunya.

Dalam kehidupan manusia diikat oleh aturan-aturan tertentu sebagai upaya untuk menjadikan hidup ini tertata dengan baik. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan ummat manusia adalah hukum agama. Khususnya agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa berperanserta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Diantara wujud peran serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah kesediaan untuk mewakafkan sebahagian harta yang dimilikinya.

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seseorang dalam perwakafan dilakukan secara sukarela di samping wakaf ini berfungsi sosial, juga adalah bahagian dari ibadah kepada Allah SWT. Sementara ibadah yang dilakukan dan bisa mendapatkan ridha dari-Nya haruslah dengan dasar ikhlas. Namun tentunya tidak bisa lepas dari adanya stimulus berupa rangsangan dari



luar, seperti penyuluhan agama yang intinya bagaimana Islam mensyariatkan kepada para pemeluknya untuk berwakaf. Dengan demikian, masyarakat perlu mewakafkan tanah miliknya dalam rangka kepentingan umum sesuai ketentuan-ketentuan syari'at Islam, sehingga dalam mewakafkan tanah miliknya tidak terjadi adanya tindakan yang di luar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemikiran tersebut, diduga bahwa terdapat hubungan antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, atau semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang perwakafan, maka semakin tinggi pula partisipasinya dalam perwakafan tanah milik.

## **2. Hubungan antara Sikap dengan Partisipasi Masyarakat terhadap Perwakafan Tanah Milik**

Sikap terhadap perwakafan merupakan ungkapan perasaan yang sifatnya dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek yang didasari oleh perasaan dan keyakinan yang menonjol cenderung akan bersifat baik terhadap obyek tersebut. Demikian pula sebaliknya jika seseorang memiliki perasaan dan keyakinan yang kurang baik maka sikapnya akan cenderung kurang baik pula.

Terlepas dari dimensi perasaan dan keyakinan seseorang untuk berperilaku terhadap suatu obyek, maka keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan juga terkait dengan pandangannya mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Seseorang akan secara sadar berperan serta dalam suatu kegiatan bila merasakan adanya manfaat bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perasaan dan keyakinan disertai dengan kesadaran yang terbentuk dalam diri seseorang merupakan dasar terbentuknya struktur konseptual sikap terhadap obyek tertentu yang akan dilakukan. Demikian pula keterlibatan masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Masyarakat cenderung berperan serta dalam perwakafan tanah milik jika masyarakat bersikap positif terhadap perwakafan, sebab reaksi yang dilakukan terhadap perwakafan sangat tergantung pada sikapnya.

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa terdapat hubungan positif antara sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat pada perwakafan tanah milik, artinya bahwa semakin positif sikap masyarakat terhadap perwakafan, maka semakin tinggi partisipasinya pada perwakafan tanah milik, demikian pula sebaliknya.

### **3. Hubungan antara Pemahaman dan Sikap terhadap Perwakafan dengan Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik**

Seseorang yang berperanserta dalam perwakafan tanah milik tidak hanya ditentukan oleh tingkat pemahamannya pada keberadaan wakaf tersebut. Meskipun seseorang memiliki pemahaman mengenai pentingnya masyarakat untuk berwakaf, namun tidak ada perasaan senang terhadap suatu kegiatan atautkah tidak berdampak positif pada dirinya, maka tidak akan pernah ada kecenderungan untuk berpartisipasi mewakafkan tanah miliknya.

Oleh karenanya, bisa diasumsikan bahwa pemahaman dan keyakinan serta dorongan untuk bertindak pada suatu obyek tertentu pada akhirnya akan mempengaruhi partisipasi seseorang. Demikian pula . partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik ada hubungannya dengan tingkat pemahaman dan keyakinan serta perasaan seseorang pada perwakafan. Karena memang wakaf sebagai suatu yang disyariatkan, khususnya dalam ajaran Islam sebagai suatu ideologi sangat berkaitan dengan keyakinan. .

Dengan adanya pemahaman masyarakat tentang konsepsi Islam, maka dapat diprediksi bahwa akan berpengaruh terhadap terbentuknya sikap positif masyarakat

terhadap perwakafan tanah milik. Karena bilamana masyarakat yang paham akan konsepsi Islam tentang perwakafan tentu dengan sendirinya menyadari dan akan turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konsepsi Islam tentang perwakafan.

### **G. Pengajuan Hipotesis**

1. Terdapat hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar
2. Terdapat hubungan antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar.
3. Terdapat hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan sikap masyarakat terhadap perwakafan secara bersama-sama dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar

### **BAB III**

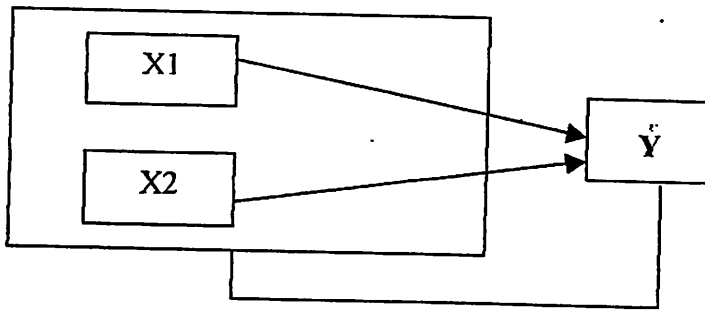
#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian terapan, ditinjau dari pendekatannya termasuk penelitian survei, dan jika berdasarkan pada tingkat penjelasannya (eksplanasinya) termasuk penelitian deskriptif yang bersifat asosiatif (Danin, 1977; Soehartono, 1995).

##### **B. Variabel Variabel Penelitian dan Pola Hubungan**

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu: Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari ; ( $X_1$ ) pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan variabel ( $X_2$ ) sikap masyarakat terhadap perwakafan. Sedangkan variabel terikat ( $Y$ ) yaitu partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, rancangan penelitian ini dapat ditunjukkan pada bagan berikut ini:



Keterangan:

$X_1$  = Pemahaman masyarakat tentang perwakafan

$X_2$  = Sikap masyarakat terhadap perwakafan.

$Y$  = Partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

### C. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai variabel dalam penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa definisi operasional variabel sebagai berikut:

#### 1. Variabel Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan ( $X_1$ )

Variabel  $X_1$ , adalah pemahaman masyarakat tentang perwakafan yang dimaksudkan, yaitu tingkat kemampuan masyarakat memahami arti atau konsep dalam menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi hal-hal yang terkait dengan perwakafan dan terbatas pada indikator: (1) dasar hukum wakaf, (2) syarat-syarat wakaf, (3) macam-macam wakaf, (4) fungsi dan tujuan wakaf.

## **2. Variabel Sikap Masyarakat terhadap Perwakafan ( $X_2$ )**

Variabel  $X_2$ , yaitu sikap masyarakat terhadap perwakafan tanah milik, adalah keyakinan mengenai perwakafan tanah milik yang menghasilkan penilaian dan perasaan emosional, baik positif maupun negatif, mendukung atau menolak setiap upaya masyarakat mewakafkan tanah miliknya, indikator-indikator adalah (1) dasar hukum wakaf, (2) institusi lembaga perwakafan, (3) Syarat dan macam wakaf (4) fungsi dan tujuan wakaf.

Pemberian skor dalam mengukur sikap masyarakat terhadap perwakafan ini mengacu pada kuisioner skala sikap dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan prinsip pernyataan positif dengan skor 5,4,3,2,1 sedang pernyataan negatif kutubnya di balik yaitu SS=1 S=2, R=3, TS=4, STS=5.

## **3. Variabel Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik (Y)**

Variabel Y, yaitu partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, yaitu keterlibatan fisik dan mental masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa buah pikiran, tenaga dalam pemberian informasi dan pengurusan legalitas perwakafan tanah milik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Variabel ini diukur melalui penentuan indikator-

indikator yaitu: (1) keterlibatan fisik dan mental (2) partisipasi bebas (3) partisipasi paksaan atau tekanan. Pemberian skor dalam mengukur partisipasi masyarakat terhadap perwakafan mengacu pada hasil jawaban responden terhadap instrumen yang telah diberikan.

#### **D. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu sejak bulan Mei sampai dengan Oktober 2002, termasuk uji coba instrumen. Tempat penelitian adalah wilayah pemerintahan kota Makassar.

#### **E. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini meliputi warga masyarakat kota Makassar yang beragama Islam yang telah berwakaf. Berdasarkan data dari Kantor Departemen agama kota Makassar, jumlah pewakaf/yang telah mewakafkan tanahnya sebanyak 238 orang, sebaran populasi yang telah berwakaf dipaparkan pada lampiran 7



## **2. Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah "Sampel Random Sampling" (Sugiyono, 1997; Abustam, dkk, 1988).

Langkah-langkah yang di tempuh adalah sebagai berikut:

- a. Secara random mengambil 25% dari jumlah populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.
- b. Dari hasil random sampling di dapatkan 60 orang sebagai responden dan inilah yang dijadikan responden sebagai subyek penelitian.

## **F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya dalam penelitian ini ditempuh beberapa cara atau langkah. Teknik yang di tempuh sedapat mungkin menggunakan teknik yang dapat menjaring data berdasarkan jenis data yang di harapkan. Untuk maksud di atas, penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari instansi terkait berupa luas wilayah dan jumlah wakif.

- 2) Kuesioner (tes) yaitu sejumlah pertanyaan/pernyataan yang diberikan kepada responden untuk di tanggap. Instrumen alat ukur yang digunakan pada pengumpulan data adalah sejumlah pernyataan yang di susun oleh peneliti berdasarkan hasil konsultasi dengan dosen pembimbing, mengenai hal penyusunan alat pengukuran serta dalam proses pengumpulan data.
- 3) Observasi, hanya sekedar pengamatan untuk melengkapi data dokumentasi (sekunder)
- 4) Wawancara bebas, yaitu tanya jawab (face to face) antara peneliti dengan responden yang dilakukan tanpa ada pedoman khusus yang digunakan, namun materi wawancara tetap dalam kerangka topik penelitian guna memperoleh data-data dan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat mempertajam analisis ketiga variabel dalam penelitian ini .

Alat yang di gunakan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini adalah Instrumen tes pemahaman  $X_1$ , Instrumen skala sikap untuk data primer  $X_2$  dan Instrumen (skala partisipasi) untuk data primer Y, wawancara terstruktur dan observasi. Kuesioner tes yang digunakan berisi daftar pertanyaan dan pernyataan untuk menjaring data variabel

Pemahaman masyarakat terhadap perwakafan ( $X_1$ ), Sikap masyarakat terhadap perwakafan ( $X_2$ ) dan variabel partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. ( $Y$ ).

**a) Tes Pemahaman tentang Perwakafan**

Instrumen ini di susun dalam bentuk pilihan ganda dan materinya disesuaikan dengan kajian teori yang mendasarinya. Penyusunan tes, yang dilakukan sedemikian rupa supaya dapat mengacu terhadap terungkapnya pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum pelaksanaan suatu perwakafan, pemahaman masyarakat terhadap arti dan makna serta tujuan wakaf, macam-macam wakaf, fungsi wakaf.

Selain itu tes tersebut di susun dengan berdasarkan pada aspek- aspek kognitif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1980), yaitu pemahaman. Dengan demikian instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap perwakafan tanah milik telah di susun berdasarkan indikator yang telah di kemukakan pada difisisi operasional variabel di atas.

Adapun penyebaran item/butir-butir instrumen dapat di lihat pada kisi-kisinya sebagaimana telah disajikan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kisi-kisi Tes Variabel Pemahaman tentang Perwakafan

No	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Penyebaran Item	Jumlah
1.	Dasar hukum wakaf	- Al-Quran - Al-Hadis - Perundang-undangan di Indonesia	1, 11, 2, 12, 3, 13,	2 2 2
2.	Syarat-syarat wakaf	- Kejelasan tujuan - Jangka waktu tidak terbatas (untuk selama-lamanya) - Ikrar Wakaf	4, 14, 5, 15, 6, 16,	2 2 2
3.	Macam-macam wakaf	- Wakaf Keluarga - Wakaf Umum	7, 17, 8, 18,	2 2
4.	Fungsi dan tujuan wakaf	- Kepentingan umum dalam bidang sosial - Ibadah	9, 19, 10, 20, 21,	2 3
<b>J u m l a h t o t a l</b>				<b>21</b>

## 2) Instrumen sikap terhadap perwakafan

Untuk mengukur sikap masyarakat terhadap perwakafan tanah milik. Mengingat sikap memiliki tiga komponen, maka sikap masyarakat terhadap perwakafan tanah milik juga diungkap dalam tiga komponen yaitu kognisi, apeksi dan konasi. Instrumen skala sikap ini penyusunannya berdasarkan pada bentuk skala Likert dengan lima interval yaitu pernyataan sikap dari sangat setuju sampai sangat tidak

setuju, dengan prinsip pembobotan yaitu untuk pernyataan positif, masing-masing interval di beri bobot 5, 4, 3, 2, 1 dan untuk pernyataan negatif masing masing interval di beri bobot 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian berarti angket pengumpulan data ini sifatnya langsung dan tertutup, oleh karena itu untuk mendapatkan data kualitatif sebagai pendukung, maka dilakukan pula wawancara secara mendalam. Jumlah keseluruhan instrumen pengukuran sikap ini secara rinci di sajikan pada lampiran.

Sesuai dengan kajian teoritis, maka materi yang di jadikan acuan dalam penyusunan instrumen ini meliputi: penjelasan menurut Al-Quran, Al Hadis, Peraturan Pemerintah No 28/1977, sikap terhadap institusi, pelaksana, penerima/pemberi wakaf, Ikrar wakaf, ketentuan umur penerima dan pemberi wakaf, wakaf keluarga wakaf umum, sebagai pahala dan sebagai pembinaan keagamaan.

Penyebaran nomor item instrumen yang telah di susun berdasarkan pada indikator-indikator di atas dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2 Kisi Kisi Tes Variabel Sikap Terhadap Perwakafan

No	Dimensi	I n d i k a t o r	Penyebaran Item		Jumlah
			Positif	Negatif	
1.	Kognisi	- kewajiban dan amal jariyah	1,2	11,12	4
		- lembaga pelaksana/ petugas	3,4,	13,14	4
2.	Afeksi	-penerima dan pemberi wakaf	5,6	15,16	4
		- Ikrar wakaf	7	17	2
3.	Konasi	- wakaf keluarga dan Umum	8	18	2
		- wakaf sebagai pahala dan pembinaan	9,10	19,20	4
J u m l a h   t o t a l					20

### 3) Instrumen Partisipasi terhadap perwakafan tanah milik.

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur partisipasi masyarakat terhadap perwakafan tanah milik, yang merupakan keterlibatan fisik dan mental dalam memberikan kontribusi berupa materi tenaga dan pikiran baik secara sukarela maupun secara paksaan. Bentuk instrumen ini mengacu pada skala psikologis model liketrs dengan

menyajikan lima alternatif pilihan. Sesuai dengan kajian teoritis yang mendasarinya, materi yang dijadikan acuan dalam penyusunan ketiga bentuk instrumen di atas disusun berdasarkan kisi-kisi dan indikator-indikator yang telah di rumuskan terlebih dahulu pada bagian definisi operasional variabel di atas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kisi -kisi Instrumen Partisipasi terhadap Perwakafan

No	Sub Variabel	Indikator	Penyebaran Item	Jumlah
1.	Partisipasi/ keterlibatan fisik dan mental	- Pemberian kontribusi berupa materi dan tenaga	1, 8, 15,21	4
		Kontribusi/pemberian buah –buah pikiran	2, 9, 16	3
2.	Partisipasi bebas	- Spontan	3, 10, 17	3
		- Terinduksi (karena Penyuluhan )	4, 11, 18	3
3.	Partisipasi karena Paksaan atau tekanan	-Tekanan Hukum	5, 12, 19	3
		–Keadaan Sosial Ekonomi	6, 13, 20	3
		- Kebiasaan	7, 14, 22	3
		J u m l a h t o t a l		22

Untuk keperluan analisis data yang terjaring dari ketiga instrumen atau alat pengumpul data tersebut di atas, maka skor perolehan dari setiap butir angket dijumlahkan. Skor

untuk pemahaman masyarakat tentang perwakafan adalah skor yang di peroleh dari jumlah semua butir skala/tes pemahaman yang telah di berikan kepada subjek penelitian. Skor untuk sikap terhadap perwakafan tanah milik adalah totalitas skor perolehan responden terhadap semua butir pernyataan sikap pada perwakafan tanah yang telah diberikan pada subjek penelitian, dan skor untuk partisipasi adalah keseluruhan skor perolehan responden dari skala partisipasi yang telah di berikan kepada 60 responden sebagai subjek penelitian. Dari ketiga instrumen tersebut, setiap butir skala di beri skor sesuai dengan nilai atau bobot alternatif-alternatif jawaban berdasarkan pilihan responden dalam memberikan tanda silan (X) pada lembar jawaban yang telah di sediakan.

### **3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

Instrumen pemahaman tentang perwakafan, sikap terhadap perwakafan maupun instrumen partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik belum berbentuk standar dan valid maupun reliabel. Olehnya itu ketiga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya, sehingga betul-betul memenuhi kriteria ilmiah. Sebagaimana



dikemukakan oleh Danin (1997) bahwa, instrumen yang benar benar memenuhi kriteria ilmiah adalah instrumen atau alat ukur yang memenuhi kriteria valid, artinya benar-benar diperuntukkan dalam mengukur apa yang diklaim untuk diukur dan reliabel, maksudnya instrumen itu bersifat akurat, konsisten dan stabil sebagai alat ukur. Untuk mendapatkan instrumen yang valid (sahih) dan reliabel (andal) maka penyusunannya dilakukan dengan sangat berhati-hati kemudian diuji cobakan .

Uji coba ketiga instrumen penelitian ini, dilakukan pada 28 orang yang mempunyai karakteristik sama dengan subyek yang akan diteliti, tetapi tidak termasuk dalam rancangan sampel penelitian yang sesungguhnya. Dalam hal ini yang dipilih adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Wajo Makassar. Pelaksanaan uji coba dilakukan selama satu pekan yaitu tanggal 11 sampai dengan 17 Nopember 2002. Instrumen yang diuji cobakan yaitu tes pemahaman tentang wakaf sebanyak 25 butir, Instrumen (skala sikap) masyarakat terhadap perwakafan sebanyak 25 butir dan skala partisipasi terhadap perwakafan juga sebanyak 25 butir.

Uji coba dilakukan selain untuk menguji validitas dan reliabilitas empirik juga bertujuan untuk : (1) mengetahui

tingkat pemahaman masyarakat terhadap instrumen, (2) memperoleh pengalaman pelaksanaan pengumpulan data, (3) mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dijumpai pada saat penelitian sesungguhnya, dan (4) mengetahui perkiraan waktu pelaksanaan penelitian. Skor perolehan hasil uji coba dari ketiga instrumen tersebut, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen baik validitas secara teoritis, maupun secara empirik sebagai berikut:

#### **a. Uji Validitas Instrumen**

##### **1) Uji Validitas Empiris**

Instrumen penelitian ini selain dilakukan uji *validitas rasional* maka perlu pula dilakukan uji *validitas empirisnya* berdasarkan kriterium yang telah ada sebelumnya untuk mendapatkan suatu instrumen yang betul-betul memenuhi kriteria valid.

Untuk keperluan tersebut masing-masing instrumen dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji cobakan, dan dilanjutkan dengan analisis/perhitungan dengan mengacu pada *Product momen correlation*.. Pengelolaan dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir dengan skor komposit indikator (faktor) atau korelasi antara masing-masing skor

pernyataan dengan skor total dengan menggunakan komputer program Mikrosop Ekcel 2000.

Dari rangkaian proses analisis tersebut di atas, sebelum mengambil kesimpulan, maka ditetapkan lebih dahulu kriteria – kriteria sebagai patokan yang harus dipedomani. Validitas suatu tes maupun suatu instrumen dinyatakan dengan angka koefisien korelasi ( $r$ ). Dalam menentukan kategori valid tidaknya setiap nomor atau item-item pernyataan yang telah dirumuskan oleh para ahli yaitu untuk jumlah masyarakat yang terdiri dari 28 orang, maka harga  $r$  0,31 ke atas dianggap valid, kurang dari 0,31 ditolak.(Purwanto;1994). Dasar pengkategorian tingkat reliabilitas instrumen disajikan dalam lampiran 4.

## **2) Uji Validitas Secara Teoritis**

Uji validitas secara teoritis dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, penggunaan instrumen tersebut diharapkan dapat mencerminkan indikator-indikator yang diteliti. Ada bermacam-macam jenis validitas yang dikemukakan para ahli. Sangat diharapkan instrumen penelitian ini dapat menjaring data sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan hal tersebut maka, uji

validitas instrumen peneliti ini secara teoritis dilakukan dengan tiga cara yaitu; uji validitas isi (content validity), uji validitas konstruk (construct validity) dan uji validitas muka (Face validity)

*Pertama*, uji validitas isi dilakukan dengan *rational judgement* yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap item telah menggambarkan indikator-indikator dari setiap variabel secara teoritis atau belum. Olehnya itu pengujian ini menyangkut uji kecocokan setiap butir dengan bahan yang diteliti atau sejauh mana butir-butir tes yang dibuat mencakup keseluruhan situasi/kawasan isi obyek yang ingin diukur. Estimasi validitas isi tidak melibatkan perhitungan statistik apapun melainkan hanya analisis rasional. Untuk memenuhi validitas isi, maka penyusunan ketiga instrumen ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing tesis dan ahli praktisi di lapangan, sehingga butir-butir yang dirancang betul-betul dapat menggambarkan keseluruhan indikator dari variabel yang hendak diukur.

*Kedua*, Uji validitas konstruk (*construct validity*) pengujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan sejauhmana suatu instrumen teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Penetapan validitas konstruk merupakan gabungan

dari pendekatan logis empiris. Salahsatu pendekatan logis adalah mempersoalkan unsur-unsur yang membentuk konstruksi tersebut karena, validitas konstruksi diupayakan dapat mengukur/mendeteksi semua aspek psikologi (Arikunto,1999; Azwar 1998). Untuk memenuhi validitas konstruk dari ketiga instrumen dalam penelitian ini, maka secara spesifik penyusunannya didasarkan pada variabel dan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori-teori yang mendasarinya. Indikator dari setiap konsep dikembangkan lebih lanjut dalam butir-butir instrumen dengan membuat kisi-kisi instrumen terlebih dahulu, sebab indikator-indikator tersebut dapat menampilkan atau menggambarkan konstruk yang mewakili karakteristik dasar dari suatu aspek dalam variabel yang ingin dideteksi.

*Ketiga, Uji Validitas muka (Face validity).* Pengujian ini, dimaksudkan untuk mengetahui apakah butir-butir tes atau angket memberi kesimpulan bahwa tes tersebut telah mengukur aspek yang sesuai dengan indikator-indikator dari variabel yang hendak diukur berdasarkan pertimbangan akal sehat (common sence). Untuk itu, penyusunan ketiga instrumen ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan

berpedoman pada kisi-kisi, dan sebelum diuji cobakan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komisi pembimbing dan ahli-ahli lain yang berkompeten dalam bidang yang hendak diukur. Berdasarkan pendapat, penilaian serta saran, selanjutnya dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan.

Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria validitas seperti tersebut di atas, maka ketiga instrumen yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini dapat dianggap telah memenuhi validitas rasional atau validitas logis, yaitu suatu jenis validitas yang diperoleh dengan melalui suatu usaha yang sangat hati-hati berdasarkan atas analisis atau pertimbangan yang rasional. Akan tetapi ketiga instrumen tersebut tentu masih perlu lagi dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya secara empiris.

#### **b. Uji Reliabilitas Instrumen**

Setelah dilakukan pengujian validitas setiap butir dari masing-masing instrumen tersebut di atas, maka dilanjutkan pula dengan pengujian *Reliabilitas*. Istilah reliabel dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. (Singarimbun dan Effendi ed, 1989 ; Nazir,1983). Reliabel berarti keajegan skor-skor yang diperoleh oleh individu yang

sama walaupun dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda.

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari masing-masing instrumen yang dipakai sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini, maka dianalisis dengan menggunakan teknik formula alpha dari Cronbach (Azwar, 1995). Alasan penggunaan rumus formula alpha tersebut, karena skor yang diperoleh dari setiap butir instrumen adalah berbentuk gradasi yakni 1 sampai 5

### **c. Hasil Analisis Uji Coba Instrumen**

Hasil analisis data uji coba instrumen pada ketiga variabel penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 75 butir, yaitu masing-masing sebanyak 25 butir instrumen untuk setiap variabel dan pada akhirnya didapatkan beberapa butir instrumen yang dianggap valid maupun reliabel serta butir-butir instrumen yang dianggap tidak memenuhi kriteria valid dan reliabel sebagai berikut:

#### **1) Instrumen Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan**

Dari 25 butir soal yang diuji cobakan setelah dilakukan uji validitas internal ternyata ada 4 butir instrumen yang ditolak karena nilai  $r$  hitungnya lebih kecil dari nilai  $r$  tabel

pada taraf signifikansi 5%. Untuk taraf signifikansi 5% dengan  $n=28$ , maka nilai  $r$  tabel adalah 0,31. Adapun butir-butir instrumen pemahaman masyarakat tentang perwakafan yang gugur adalah butir nomor 4, 7, 14 dan 23 karena korelasinya masing-masing hanya, 0,289, 0,233, 0,248 dan 0,207.

Selanjutnya hasil analisis reliabilitas dari hasil perhitungan analisis KR-20 diperoleh 0,82282. Ini menunjukkan bahwa instrumen untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang perwakafan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Sehingga butir-butir instrumen pemahaman tentang perwakafan yang tadinya berjumlah 25 butir, namun yang dianggap memenuhi kriteria valid dan reliabel hanya 21 butir instrumen dan itulah yang dipergunakan dalam penelitian yang sesungguhnya dalam penelitian ini.

## **2) Instrumen Sikap terhadap Perwakafan.**

Instrumen untuk variabel sikap terhadap perwakafan yang diuji cobakan yaitu sebanyak 25 butir, akan tetapi setelah dianalisis ternyata ada 5 butir instrumen yang ditolak, yakni butir nomor 6, 10, 16, 21, dan 23 dengan korelasinya ( $r$ ) masing-masing hanya 0,307, 0,247, 0,097, 0,351, dan 0,213 dan dianggap tidak memenuhi persyaratan valid yang telah ditetapkan sebelumnya..



Selanjutnya setelah dilakukan analisis Reliabilitas maka diperoleh jumlah varians Total (JVt) sebesar 107,892, Jvi sebesar 21,754 dan reliabilitasnya = 0,798. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian hasil analisis dari 25 butir instrumen sikap siswa terhadap sejarah yang diuji cobakan ternyata hanya 20 butir saja yang dianggap valid dan reliabel itulah yang digunakan untuk menjaring data dalam penelitian sesungguhnya.

### **3) Instrumen Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik**

Instrumen untuk variabel partisipasi masyarakat dalam perwakafan yang diuji cobakan yaitu sebanyak 25 butir, namun setelah dianalisis ternyata ditolak 3 butir, yakni butir nomor 5, 16, dan 19 sebab korelasinya ( $r$ ) hanya masing-masing 0,2775, 0,2341, dan 0,2673. Ini dianggap tidak memenuhi persyaratan valid. Selanjutnya setelah dilakukan analisis reliabilitas instrumen tersebut diperoleh JVt 95,230, Jvi sebesar 17,597 dengan tingkat reliabilitasnya cukup tinggi yaitu 0,8152 sehingga instrumen partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik yang tadinya berjumlah 25 butir, setelah dilakukan analisis validitas terhadap skor perolehan dari uji coba ternyata tinggal 22 butir dianggap memenuhi

kriteria valid dan reliabel. Walaupun telah ditolak tiga butir tetapi instrumen yang valid masih mewakili karakteristik yang ingin diukur dalam penelitian sesungguhnya.

Rangkuman hasil-hasil analisis validitas data uji coba dari ketiga instrumen yang telah digunakan dalam penelitian ini secara sederhana dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen**

No	V a r I a b e l	Jumlah item	No soal gugur	Jumlah Gugur	Jumlah Valid
1	Pemahaman masyarakat tentang perwakafan	25	4, 7, 14,23	4	21
2	Sikap masyarakat terhadap perwakafan	25	6, 10, 16, 21, 23	4	20
3	Partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik	25	5, 16, 19	3	22

Dari tabel rangkuman hasil uji validitas pada ketiga instrumen di atas, telah menunjukkan bahwa butir-butir yang memenuhi kriteria valid/sahih masih mewakili setiap indikator-indikator dari setiap variabel yang akan diukur, sebab dari 75 butir tes (instrumen) yang di uji cobakan ternyata yang di tolak atau tidak memenuhi kriteria secara keseluruhan hanyalah 11 butir saja.

Rangkuman hasil analisis reliabilitas dari ketiga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini secara sederhana, disajikan pada tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Instrumen	Variabel	N	JVt	JVi	Reliabilitas
A	Pemahaman tentang perwakafan	25	23,180	4,788	0,82282
B	Sikap terhadap perwakafan	25	107,892	21,754	0,798
C	Partisipasi dalam perwakafan tanah milik	25	95,230	17,597	0,8152

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam mengolah data hasil penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis infrensial.

### **1. Analisis Deskriptif.**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik-karakteristik responden pada masing-masing variabel pada wilayah atau lokasi penelitian berdasarkan masalah 1, masalah 2 dan masalah 3 yang telah dirumuskan. Untuk maksud tersebut digunakan analisis statistik deskriptif yang meliputi: ukuran pemusatan yaitu rata-rata hitung ( $\bar{X}$ ), Median ( $Me$ ) dan Modus ( $Mo$ ) dan ukuran

penyebaran yaitu simpangan baku atau deviasi standar (s) serta distribusi frekuensi dan persentase.

## 2. Analisis Inferensial.

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan masalah 4, masalah 5, dan masalah 6. Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang telah diajukan, maka teknik analisis yang digunakan meliputi teknik- teknik analisis regresi linier, baik regresi sederhana maupun regresi ganda atau dua prediktor.

Model regresi yang di pilih untuk menganalisis data hasil penelitian adalah model regresi linier ganda dengan bentuk:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

$Y$  = Skor partisipasi masyarakat terhadap perwakafan tanah milik.

$X_1$  = Skor variabel pemahaman tentang perwakafan

$X_2$  = Skor sikap terhadap perwakafan

$\beta_0$  = Konstanta regresi

$\beta_1$  = Koefisien regresi untuk variabel pemahaman

$\beta_2$  = Koefisien regresi untuk variabel sikap

$\epsilon$  = Kesalahan random yang di asumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians  $\sigma^2$

Fungsi taksiran atau persamaan regresi untuk model tersebut adalah:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Skor partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik

$b_0$  = estimator  $\beta_0$

$b_1$  = estimator  $\beta_1$

$b_2$  = estimator  $\beta_2$

Model regresi tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel bebas yaitu pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perwakafan ( $X_1$ ,  $X_2$ ) dengan satu variabel terikat yaitu partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik ( $Y$ ). Disamping itu, analisis regresi ini diterapkan berdasarkan asumsi: (1) kenormalan residual populasi terpenuhi untuk variabel terikat, (2) skor-skor variabel terikat untuk masing-masing anggota populasi bersifat independen, tidak terjadi multikolinieritas antara variabel-variabel bebas dan sampel yang berupa data berpasangan antara variabel bebas dan variabel terikat diambil dengan memenuhi sifat acak dan termasuk berukuran besar (minimal 30).

Kriteria pengujian untuk regresi ganda memakai uji-F yang didasarkan pada pendekatan analisis varians dan pada taraf signifikansi 0,05 dengan pormulasi rumus:

$$F = \frac{JK_{reg} / k}{JK_{res} / n - k - 1}$$

Keterangan:

F = Nilai statistik Fisher

JK reg = Jumlah kuadrat regresi

JK res = Jumlah kuadrat residu

k = Banyaknya variabel bebas

n = Banyaknya data (Sujana,1996:355)

Apabila signifikan  $F_h$  lebih besar dari  $F_t$ , maka regresi tersebut signifikan dan di pandang cocok untuk di tegakkan dalam membuat kesimpulan mengenai hubungan  $X_1, X_2$  terhadap Y. Untuk menyelidiki keberartian berhubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas yaitu dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan korelasi persial dengan memakai uji-t, digunakan pada taraf signifikansi 0,05. Kuadrat dari koefisien korelasi persial menyatakan kontribusi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas baik secara

simultan maupun secara sendiri-sendiri. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer program pengolahan data SAS (Statistical Analysis System). Adapun hipotesis yang diuji adalah:

#### Hipotesis 1

$H_0$ : Pemahaman Masyarakat tentang perwakafan tidak berhubungan positif terhadap partisipasi dalam perwakafan tanah milik

$H_1$ : Pemahaman Masyarakat tentang perwakafan berhubungan positif terhadap partisipasi dalam perwakafan tanah milik

Hipotesis statistiknya yaitu:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_2 > 0$$

#### Hipotesis 2

$H_0$ : Sikap masyarakat terhadap perwakafan tidak mempunyai hubungan positif terhadap partisipasi dalam perwakafan tanah milik.

$H_1$ : Sikap masyarakat terhadap perwakafan berhubungan positif terhadap partisipasi dalam perwakafan tanah milik.

Hipotesis statistiknya yaitu:

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_2 : \beta_2 > 0$$

### Hipotesis 3

$H_0$  : Pemahaman masyarakat terhadap perwakafan tanah milik dan Sikap masyarakat terhadap perwakafan secara bersama-sama tidak berhubungan terhadap partisipasi dalam perwakafan tanah milik

$H_1$  : Pemahaman masyarakat terhadap perwakafan tanah milik dan sikap masyarakat terhadap perwakafan secara bersama-sama berhubungan terhadap partisipasi dalam perwakafan tanah milik

Hipotesis statistiknya yaitu:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_1 \text{ atau } \beta_2 \neq 0$



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran/distribusi data, baik berupa ukuran gejala sentral. Ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Harga-harga yang akan disajikan setelah **diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik** deskriptif, yaitu harga rata-rata, simpangan baku, modus, median, destribusi frekuensi serta grafik histogram.

Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yakni; (1) pemahaman masyarakat tentang perwakafan, (2) sikap masyarakat terhadap perwakafan, (3) partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 04. Sedangkan uraian singkat hasil perhitungan statistik dekriptif tersebut akan dikemukakan berikut ini:

#### 1. Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan

Skor teoritik nilai yang diharapkan diperoleh masyarakat dari variabel pemahaman tentang perwakafan adalah terletak

pada rentangan skor antara 0 sampai 21. Ternyata hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang perwakafan hanya diperoleh skor antara 5 sampai 18. Dengan menggunakan aturan Sturges ( $K = 1 + 3,3 \log n$ ), diketahui banyaknya kelas adalah 6,92 dibulatkan 7 dan panjang kelas interval adalah 1,85. Harga rata-rata hitung sebesar 11,18, modus sebesar 11, standar deviasi 2,63. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel 05 berikut ini.

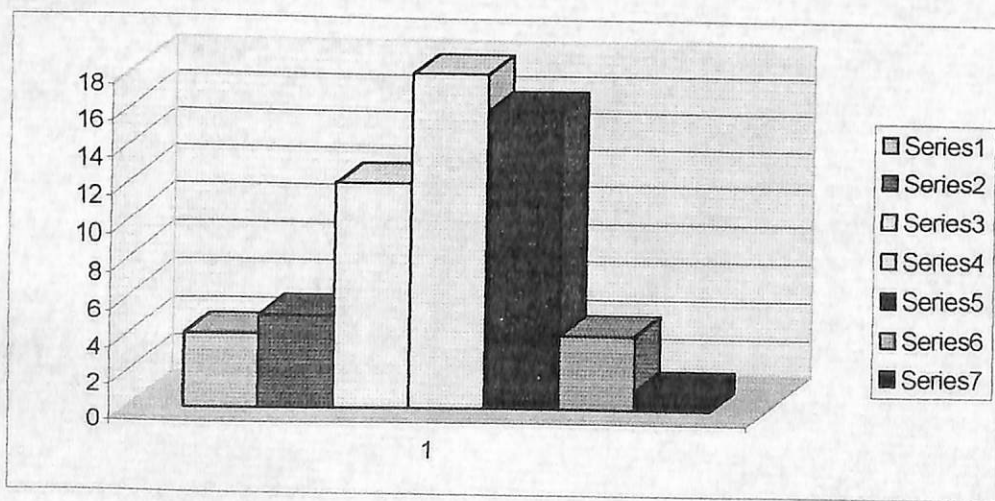
**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan**

No	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	5 - 6	4	6,66
2	7 - 8	5	8,33
3	9 - 10	12	20
4	11 - 12	18	30
5	13 - 14	16	26,66
6	15 - 16	4	6,66
7	17 - 18	1	1,66
Jumlah		60	100,0

Data yang terlihat pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan dengan harga-rata-rata menunjukkan nilai pemahaman masyarakat tentang perwakafan dibawah kelompok rata-rata sebanyak 21 responden (35%), yang berada pada kelompok rata-rata adalah 18 responden (30%), dan yang

berada di atas kelompok/kelas harga rata-rata adalah 22 responden (35 %). Selain itu dapat dilihat bahwa rata-rata hitung, median dan modus berada pada titik nilai yang sama. Jadi kurva pemahaman tentang perwakafan adalah cenderung seimbang, menunjukkan bahwa responden yang mendapat skor rendah berbanding sama dengan yang mendapat skor tinggi, berarti nilai pemahaman masyarakat tentang perwakafan di Kota Makassar adalah termasuk dalam kategori sedang. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor terutama pendidikan dan penyuluhan.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai gambaran variabel pemahaman tentang perwakafan secara sederhana di sajikan dalam bentuk garafik seperti pada gambar 1 di bawah ini;



Grafik 1. Histogram Frekuensi Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan

## 2. Sikap Masyarakat terhadap Perwakafan

Skor teoritik yang diharapkan diperoleh dari penelitian untuk variabel sikap masyarakat terhadap perwakafan adalah berada pada rentangan skor antara 20 sampai dengan 100, namun setelah dilakukan analisis ditemukan skor nilai antara 69 sampai 93. Dengan menggunakan aturan Sturges ( $K = 1 + 3,3 \log n$ ), diketahui banyaknya kelas adalah 6,92 dibulatkan 7 dan panjang kelas interval adalah 3,428 (dibulatkan 4). Melalui analisis statistik ukuran pemusatan di peroleh nilai rata-rata sebesar 79,16, median = 79, Modus = 76, dan statistik ukuran penyebaran diperoleh standar deviasi sebesar 5,79. Distribusi frekuensi disajikan pada tabel 7 berikut ini.

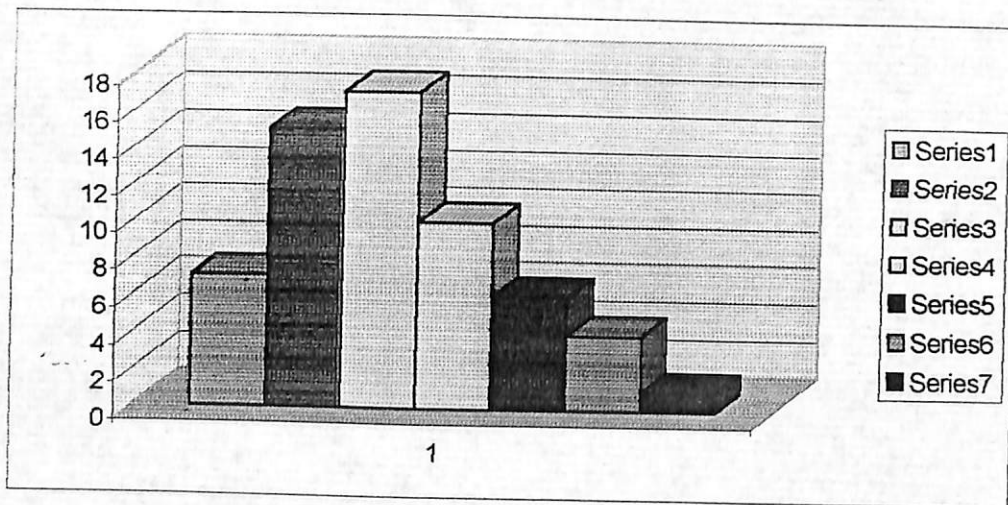
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Sikap terhadap Perwakafan

No	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	69 - 72	7	11,66
2	73 - 76	17	28,33
3	77 - 80	15	25
4	81 - 84	10	16,66
5	85 - 88	4	6,66
6	89 - 92	6	10
7	93 - 96	1	1,66
Jumlah		60	100,0

Sumber: Survei lapangan 2002



Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika dibandingkan dengan harga rata-rata di bawah harga rata-rata sebanyak 24 responden (40 %), yang berada pada rata-rata adalah sebanyak 15 responden (25 %) dan yang berada di atas harga rata-rata 21 responden (35 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap perwakafan termasuk dalam kategori kurang positif. Sedangkan histogram variabel ini dapat ditunjukkan pada grafik 2 berikut ini.



Grafik 2. Histogram Frekuensi Sikap Masyarakat Terhadap Perwakafan

### 3. Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik

Skor teoritik yang diharapkan diperoleh dari penelitian untuk variabel partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik mestinya berada pada rentangan skor 22 sampai 110.

Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa skor variabel partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik berada antara 46 sampai dengan 100. Melalui menggunakan aturan Sturges ( $K = 1 + 3,3 \log n$ ), di ketahui banyaknya kelas adalah 6,92 dibulatkan 7 dan panjang kelas interval adalah 7,71 (dibulatkan 8). Melalui analisis statistik ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran diperoleh harga rata-rata hitung sebesar 72,66, sebesar 12,22, median sebesar 73,5, modus sebesar 67, simpangan baku atau standar deviasi Sedangkan distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

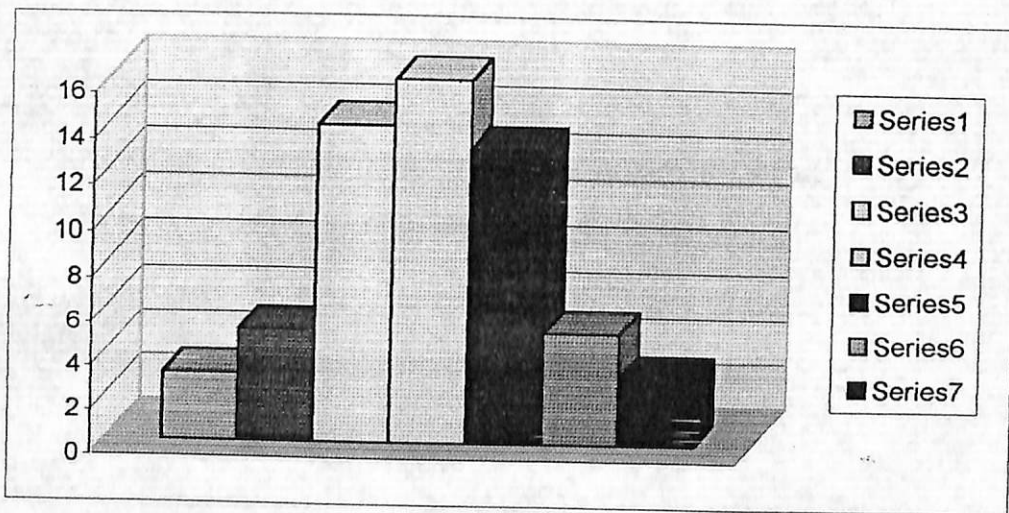
**Tabel 8. Distribusi Frekuensi Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik**

No	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	46 - 53	3	5
2	54 - 61	6	10
3	62 - 69	14	23,33
4	70 - 77	16	26,66
5	78 - 85	13	21,66
6	86 - 93	5	8,33
7	94 - 101	3	5
Jumlah		60	100,0

Sumber: Survei lapangan 2002

Dari data yang terlihat pada distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan dengan harga rata-rata menunjukkan bahwa

skor partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik yang berada di bawah harga rata-rata sebanyak 23 responden (38,33 %), yang berada pada skor rata-rata adalah sebanyak 16 responden (26,66 %) dan yang berada di atas harga rata-rata 21 responden (35 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik termasuk dalam kategori sedang. Untuk lebih memperjelas mengenai gambaran data variabel ini, secara sederhana dapat ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini.



Grafik 3. Histogram Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik

#### B. Hasil Analisis Statistik Inferensial (Pengujian Hipotesis)

Berikut ini disajikan hasil-hasil analisis yang diperoleh mengenai hubungan antara pemahaman dan sikap terhadap

perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik di kota Makassar.

**1. Hubungan antara Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan dengan Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik**

Hipotesis pertama yang diajukan adalah terdapat hubungan positif antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, dan sebaliknya tidak terdapat hubungan positif antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik.

Dari data yang diperoleh mengenai hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, diperoleh model regresi sederhana yaitu:  $\hat{Y} = 42,362 + 2,709X_1$ . Model persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap pertambahan  $X_1$  (pemahaman tentang perwakafan) diharapkan partisipasi dalam perwakafan akan bertambah sebesar 2,709 pada konstanta 42,362.

Untuk mengetahui apakah model persamaan garis regresi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau apakah persamaan garis regresi yang telah diperoleh signifikan atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan analisis varians



(uji-F). Kriteria penilaiannya adalah  $F_{hitung} > F_{tabel} (0,01) (1:60)$ . Uji F mengungkapkan bahwa model regresi yang diperoleh sangat berarti dan bentuk persamaannya adalah linier. Dengan demikian model persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sangat signifikan. Oleh karena itu persamaan regresi  $Y = 42,362 + 2,709X_1$  dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik. Untuk lebih jelasnya rangkuman hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel 9

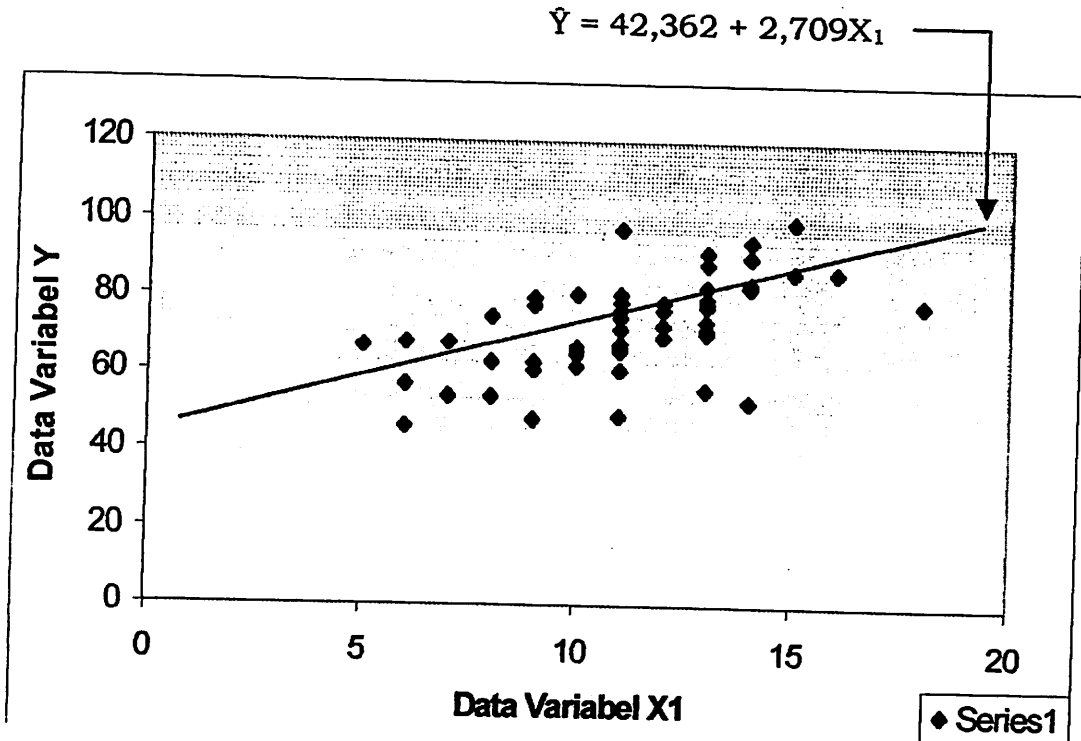
**Tabel 9: ANAVA untuk Regresi Sederhana  $Y = 42,362 + 2,709X_1$ .**

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Rata-rata Kuadrat	$F_{hitung}$	$F_{tabel} (0,05)$
Model	1	3017,77	3017,77	30,211**	1,00
Galat	58	5793,56	99,89		
Total	59	8811,33			

\*\*Sangat Signifikan ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ )

Jika persamaan regresi sederhana pasangan data antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, maka bentuk hubungannya

adalah linier seperti yang telah diilustrasikan secara sederhana seperti dalam grafik berikut ini:



**Grafik 5. Regresi Linier sederhana  $\hat{Y} = 42,362 + 2,709X_1$**

Perhitungan korelasi sederhana terhadap pasangan data variabel pemahaman masyarakat terhadap perwakafan ( $X_1$ ) dengan variabel partisipasi dalam perwakafan tanah milik ( $Y$ ) menghasilkan harga koefisien korelasi  $r$  sebesar 0,58.

Kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi  $r^2 = 0,3425$ . Hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi tersebut sangat nyata. Hasil uji  $t$  disajikan dalam tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10: Hasil Pengujian Keberartian Koefisien Korelasi Pemahaman masyarakat tentang perwakafan ( $X_1$ ) dengan Partisipasi dalam Perwakafan tanah Milik ( $Y$ )**

Variabel	dk	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$ (0,05)
$r_{y.1} = 0,71$	59	5,496**	2,66

\*\*sangat signifikan ( $t_{hitung} > t_{tabel} (0,05)$ )

Hasil analisis hubungan sederhana tersebut berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang perwakafan semakin positif pula partisipasi dalam perwakafan tanah milik. Temuan dalam penelitian ini sekaligus menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, dan menerima  $H_1$  yang menyatakan terdapat hubungan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik.

## **2. Hubungan antara Sikap Masyarakat terhadap Perwakafan dengan Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik**

Hipotesis kedua yang diajukan adalah Terdapat hubungan positif antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik,

dan sebaliknya tidak terdapat hubungan positif antara sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik.

Dari data yang diperoleh mengenai hubungan antara sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, diperoleh model regresi sederhana yaitu:  $Y = 16,902 + 0,704X_2$ . Model persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap pertambahan  $X_2$  (sikap terhadap perwakafan) diharapkan partisipasi dalam perwakafan akan bertambah sebesar 0,704 pada konstanta 16,902.

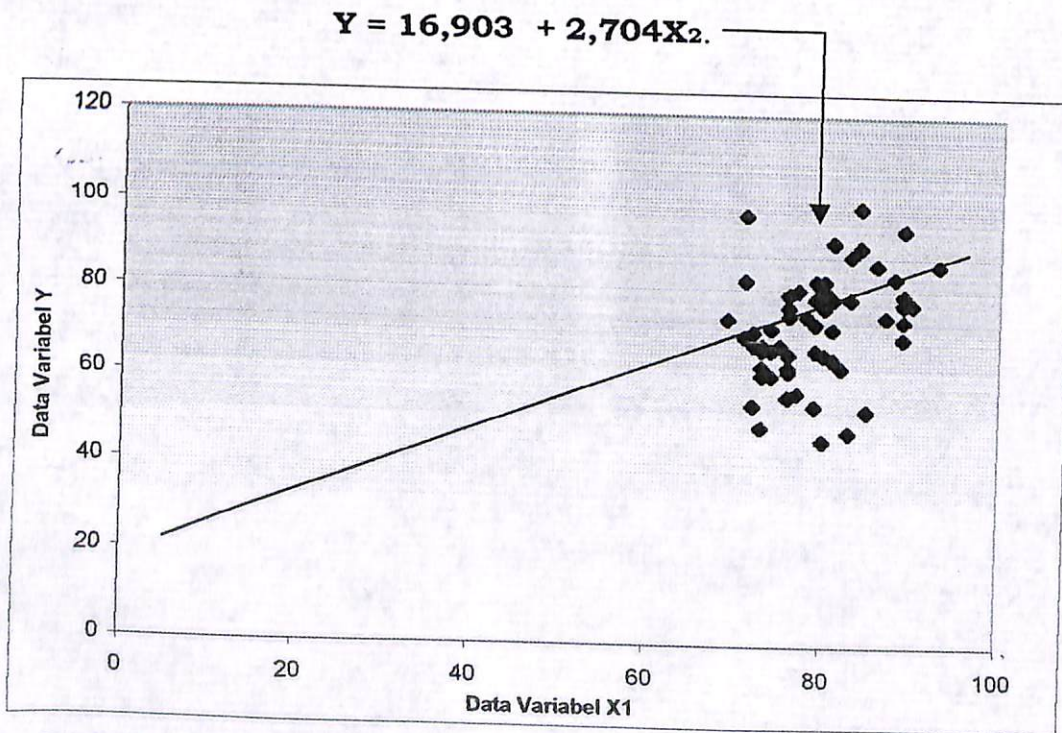
Untuk mengetahui apakah model persamaan garis regresi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau apakah persamaan garis regresi yang telah diperoleh signifikan atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan analisis varians (uji-F). Kriteria penilaiannya adalah  $F_{hitung} > T_{tabel} (0.01) (1:60)$ . Uji F mengungkapkan bahwa model regresi yang diperoleh sangat berarti dan bentuk persamaannya adalah linier. Dengan demikian model persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan signifikan. Oleh karena itu persamaan regresi  $Y = 16,903 + 0,704X_2$  dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai hubungan antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik. Untuk lebih jelasnya rangkuman hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel 11

Tabel 11: Analisis Varians (ANOVA) untuk Model Regresi Sederhana  $Y = 16,903 + 2,704X_2$ .

Sumber Variasi	Derajat bebas	jumlah Kuadrat	Rata-rata Kuadrat	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub> (0,05)
Model	1	983,561	983,561	7,288*	1,00
Galat	58	7827,771	134,961		
Total	59	8811,333			

\*\*Sangat Signifikan ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ )

Jika persamaan regresi sederhana pasangan data antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, maka bentuk hubungannya dapat dilukiskan seperti grafik berikut ini:



Grafik 6. Regresi Linier Sederhana  $\hat{Y} = 16,903 + 2,704X_2$ .

Melalui uji t diperoleh koefisien korelasi  $r_{y.2} = 0,33$ . Kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi  $r^2 = 0,1116$ . Hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi tersebut sangat nyata. Hasil uji t disajikan dalam tabel 12:

**Tabel 12: Hasil Pengujian Keberartian Koefisien Korelasi Sikap terhadap Perwakafan( $X_2$ ) dengan Partisipasi dalam Perwakafan Tanah Milik (Y)**

Variabel	dk	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$
			0,05
$R_{y.2} = 0,70439$	59	2,700**	2,66

\*\* signifikan ( $t_{hitung} > t_{tabel} (0,05)$ )

Hasil analisis hubungan sederhana tersebut berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sikap masyarakat terhadap perwakafan semakin positif pula partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Temuan dalam penelitian ini sekaligus menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada hubungan antara sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, dan menerima  $H_1$  yang menyatakan terdapat hubungan antara sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

### 3. Hubungan antara Pemahaman tentang perwakafan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah terdapat hubungan positif secara bersama-sama antara pemahaman tentang perwakafan dan sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, dan sebaliknya tidak terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang perwakafan dan sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

Dari data yang diperoleh mengenai hubungan secara bersama-sama antara pemahaman tentang perwakafan dan sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, diperoleh model regresi sederhana yaitu:  $Y = 23,056 + 2,479X_1 + 0,276X_2$ . Kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi  $r^2 = 0,3572$

Untuk mengetahui apakah model persamaan garis regresi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan atau apakah persamaan garis regresi yang telah diperoleh signifikan atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan analisis varians (uji-F). Kriteria penilaiannya adalah  $F_{hitung} > T_{tabel} (0.01) (1:60)$ . Uji F mengungkapkan bahwa model regresi yang diperoleh sangat berarti dan bentuk persamaannya adalah linier Dengan

demikian model persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sangat signifikan Oleh karena itu persamaan regresi  $Y = 23,056 + 2,479X_1 + 0,276X_2$  dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai hubungan secara bersama-sama antara pemahaman tentang perwakafan dan sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Untuk lebih jelasnya rangkuman hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

**Tabel 13: ANAVA untuk Regresi Jamak  $Y = 23,056 + 2,479X_1 + 0,276X_2$**

Sumber Variasi	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Rata-rata Kuadrat	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub> (0,05)
Model	2	3147,43	1573,72	15,837	3,15
Galat	57	5663,90	99,36		
Total	59	8811,33			

Untuk mengetahui besarnya sumbangan pemahaman tentang perwakafan dan sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik dilakukan dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi. Dari hasil pengkuadratan tersebut diperoleh nilai sebesar 0,3572. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya



sumbangan  $X_1$ ,  $X_2$  terhadap  $Y$  secara bersama-sama adalah 35,72% dalam arti bahwa 64,28% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Selanjutnya, untuk melihat hubungan salah satu variabel bebas dengan variabel terikat dalam kondisi variabel bebas lainnya dikontrol (tetap), dilakukan analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial pertama dilakukan antara variabel  $Y$  dengan variabel  $X_1$ , dalam kondisi variabel  $X_2$  dikontrol (tetap). Hasil perhitungan memperoleh nilai sebesar 2,479. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial diperoleh nilai  $t_{hitung}$  4,667 dan  $t_{tabel}$  0,201 berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga koefisien korelasi parsial nampak signifikan. Analisis korelasi parsial kedua dilakukan antara variabel  $Y$  dengan variabel  $X_2$  dalam kondisi variabel  $X_1$  dikontrol (tetap). Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi 0,276. Uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  1,142 dan  $t_{tabel}$  0,258 berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga koefisien korelasi parsial nampak sangat signifikan. Rangkuman hasil analisis korelasi parsial dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14 : Rangkuman Hasil Analisis Parsial

Korelasi Parsial	Nilai	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$ pada 0,01	Keterangan
$r_{2y1-2}$	2,479	4,667	0,0001	signifikan
$r_{2y2-1}$	0,276	1,142	0,2581	signifikan

\*\* signifikan ( $t_{hitung} > t_{tabel} (0,01)$ )

Hasil analisis hubungan sederhana tersebut bahwa terdapat hubungan yang positif antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Berarti semakin tinggi pemahaman tentang perwakafan semakin positif pula partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Temuan dalam penelitian ini sekaligus menolak  $H_0$  yang menyatakan tidak ada hubungan antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, dan menerima  $H_1$  yang menyatakan terdapat hubungan antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

### C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemahaman masyarakat tentang perwakafan masih berada pada kategori

kurang tepat. Kenyataan ini memberi indikasi bahwa pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan perwakafan masih minim. Masyarakat belum sepenuhnya memahami secara hakiki dasar hukum wakaf, syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan fungsi serta tujuan wakaf.

Hasil penelitian juga memberikan indikasi, bahwa sikap masyarakat terhadap perwakafan masih berada pada kategori cenderung positif. Olehnya itu menjadi perhatian bagi lembaga perwakafan untuk senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah perwakafan.

Selanjutnya untuk partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik berada pada kategori sedang. Ini memberikan indikasi bahwa partisipasi masyarakat belum maksimal. Sementara diketahui bahwa masalah wakaf merupakan syarat kesempurnaan keIslaman seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam beberapa ayat dan hadits yang memerintahkan mengenai pentingnya wakaf.

Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masih perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Di samping itu, keberadaan wakaf selain menjadi tanggungjawab bagi setiap

Muslim yang bersyarat untuk mewakafkan tanah miliknya, juga dengan harta wakaf dapat berfungsi sosial. Dimana penggunaan harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, seperti madrasah, masjid, kuburan, dan lembaga sosial lainnya.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ternyata ketiga hipotesis alternatif yang diajukan secara signifikan dapat diterima. Uraian masing-masing penerimaan ketiga hipotesis yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengujian hipotesis pertama menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik yang ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung sebesar 5,496 jauh lebih besar dari pada nilai  $t$  tabel pada taraf signifikansi  $\alpha$  0,05 yaitu 2,66 atau  $5,496 > t_{\text{tabel } 0,01(60)}$ . Pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi  $Y = 42,362 + 2,709X_1$ . Persamaan ini memberikan informasi bahwa setiap perubahan satu unit pemahaman masyarakat tentang perwakafan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan partisipasi dalam perwakafan tanah milik sebesar 2,709.

Hasil analisis korelasi sederhana antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik diperoleh nilai koefisien korelasi  $r$  sebesar 0.58. Nilai ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik cukup tinggi, artinya makin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang perwakafan, diharapkan makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Demikian pula sebaliknya, makin rendah pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

Besarnya sumbangan atau kontribusi variabel pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik dapat diketahui dengan jalan mengkuadratkan perolehan nilai koefisien korelasi sederhananya. Hasil pengkuadratan nilai koefisien korelasi sederhananya adalah 0,4484. Secara statistik nilai ini memberikan pengertian bahwa 44,84% variasi perubahan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik ditentukan/dijelaskan oleh pemahaman masyarakat tentang perwakafan.

Kedua, pengujian hipotesis dua menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik yang ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,70 lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi  $\alpha$  0,05 yaitu 2,66 atau  $2,70 > t_{tabel}$  2,66(60). Pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi  $Y = 16,902 + 0,704X_2$ . Persamaan ini memberikan informasi bahwa setiap perubahan suatu sikap masyarakat terhadap perwakafan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik sebesar 70,4%.

Hasil analisis korelasi sederhana antara pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik diperoleh nilai koefisien korelasi  $r$  sebesar 0,3572. Nilai ini memberikan pengertian bahwa keterkaitan antara sikap masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik cukup tinggi, artinya makin positif sikap masyarakat terhadap perwakafan, diharapkan makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Demikian pula sebaliknya, makin negatif sikap masyarakat tentang

perwakafan makin rendah partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

Besarnya sumbangan atau kontribusi variabel pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik dapat diketahui dengan jalan mengkuadratkan perolehan nilai koefisien korelasi sederhananya. Hasil pengkuadratan nilai koefisien korelasi sederhananya adalah 0,33. Secara statistik nilai ini memberikan pengertian bahwa 33% variasi perubahan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik ditentukan/dijelaskan oleh sikap masyarakat terhadap perwakafan.

Ketiga, Pengujian hipotesis ketiga, dari data yang diperoleh mengenai hubungan secara bersama-sama antara pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan. Ditunjukkan dengan nilai  $F_{hitung}$  pada taraf signifikansi  $\alpha$  0,01 yaitu 3,15 atau  $F = 15,837 > F_{0,01 \ 2:60} = 3,15$ . Diperoleh model regresi ganda yaitu:  $Y = 23,056 + 2,479X_1 + 0,276X_2$ . Persamaan ini memberikan informasi bahwa satu unit skor pemahaman masyarakat tentang perwakafan, sikap terhadap perwakafan akan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan partisipasi

dalam perwakafan tanah milik. Kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi  $R^2 = 0,3572$ .

Selanjutnya, untuk melihat hubungan salah satu variabel bebas dengan variabel terikat dalam kondisi variabel bebas lainnya dikontrol (tetap), dilakukan analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial pertama dilakukan antara variabel Y dengan variabel  $X_1$ , dalam kondisi variabel  $X_2$  dikontrol (tetap). Hasil perhitungan memperoleh nilai sebesar 0,59. Apabila nilai ini dikonsultasikan dengan  $t_{tabel}$  dalam taraf nyata alpha 0,01; diperoleh nilai  $t$  4,667, berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga koefisien korelasi parsial nampak sangat signifikan. Analisis korelasi parsial kedua dilakukan antara variabel Y dengan variabel  $X_2$  dalam kondisi variabel  $X_1$  dikontrol (tetap). Hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 1,143. Apabila nilai ini dikonsultasikan dengan  $t_{tabel}$  dalam taraf nyata alpha 0,01; diperoleh nilai  $t_{tabel}$  0,2581, berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga koefisien korelasi parsial nampak signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel bebas yang mempunyai hubungan yang paling kuat dan kontribusi paling besar terhadap Y adalah pemahaman tentang perwakafan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ketiga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yang diajukan dalam penelitian ini diterima, dan menolak hipotesis nol ( $H_o$ ). Dengan demikian berarti terdapat hubungan positif antara (1) pemahaman masyarakat tentang perwakafan dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik, (2) Sikap masyarakat terhadap perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, (3) pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan sikap masyarakat terhadap perwakafan secara bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik. Hasil uji " $t$ " untuk hipotesis pertama sampai dengan hipotesis kedua, serta hasil uji " $F$ " untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ternyata hubungan tersebut sangat signifikan baik pada taraf signifikan alpha 0,05 maupun pada taraf signifikansi alpha 0,01. Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa kesimpulan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Pertama*, terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik pada masyarakat di Kota Makassar. Ini berarti bahwa

semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang perwakafan akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam perwakafan tanah milik. Sebaliknya semakin rendah pemahaman masyarakat tentang perwakafan, maka semakin rendah pula partisipasinya dalam perwakafan tanah milik. Oleh karena itu pemahaman masyarakat tentang perwakafan merupakan variabel yang penting untuk diperhatikan di dalam memprediksi keikutsertaan masyarakat dalam perwakafan.

*Kedua*, terdapat hubungan positif antara sikap terhadap perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik bagi masyarakat di Kota Makassar. Dengan demikian berarti bahwa semakin positif sikap masyarakat terhadap perwakafan akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam perwakafan tanah milik. Sebaliknya semakin negatif sikap masyarakat terhadap perwakafan, maka semakin rendah pula partisipasinya dalam perwakafan tanah milik. Temuan ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap perwakafan juga merupakan variabel yang penting untuk diperhatikan di dalam memprediksi keikutsertaan masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

*Ketiga*, terdapat hubungan positif antara pemahaman tentang perwakafan dan sikap terhadap perwakafan secara

bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik pada masyarakat di Kota Makassar. Dengan demikian berarti bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan sikap masyarakat terhadap perwakafan akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam perwakafan tanah milik. Sebaliknya semakin rendah pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan sikap masyarakat terhadap perwakafan, maka semakin rendah pula partisipasinya dalam perwakafan tanah milik. Ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang perwakafan dan sikap masyarakat terhadap perwakafan merupakan dua variabel yang penting untuk diperhatikan dalam menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik.

### **B. Implikasi penelitian**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa implikasi hasil penelitian ini. Perumusan implikasi penelitian ini menekankan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perwakafan (variabel  $X_1$ ), sikap masyarakat terhadap perwakafan (variabel  $X_2$ ), sehingga masyarakat dapat berperanserta secara aktif dalam perwakafan tanah milik (variabel  $Y$ ). upaya tersebut akan diuraikan berikut ini.

# **1. Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Perwakafan dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan**

Analisis dan kesimpulan penelitian menyatakan terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman tentang perwakafan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik. Hal ini memberikan pengertian bahwa peningkatan pemahaman tentang perwakafan akan meningkatkan partisipasi dalam perwakafan tanah milik. Temuan tersebut memberikan pengertian bahwa upaya peningkatan pemahaman tentang perwakafan juga merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perwakafan tanah milik .

Temuan lain yang diperoleh dari penelitian adalah diketahuinya bahwa pemahaman tentang perwakafan masyarakat di Kota Makassar termasuk dalam katagori sedang sebanyak 21 orang (35%). yang perolehan skornya berada di atas harga rata-rata. Meskipun demikian temuan ini belum dapat digeneralisasikan bahwa masyarakat di Kota Makassar sudah tanggap terhadap masalah-masalah perwakafan, ini terbukti dari perolehan skor tingkat partisipasinya berdasarkan dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa partisipasi masyarakat di kota Makassar termasuk sedang namun sudah cenderung lebih tinggi, karena ada sekitar 35% responden skor partisipasinya berada diatas skor rata-rata. sedangkan yang

berada dibawa skor rata-rata hanya 21,66 %. Konsistensi di antara kedua temuan ini menarik untuk dikaji atau diteliti lebih lanjut, sebab dalam kondisi pemahaman yang sedang, tingkat partisipasinya juga sedang. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perwakafan dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam perwakafan tanah milik, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

*Pertama*, masyarakat hendaknya memahami berbagai hal yang menyangkut dasar hukum, syarat-syarat, fungsi, tujuan serta peraturan-peraturan perundang-undangan tentang perwakafan tanah milik.

*Kedua*, Masyarakat harus memahami berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah perwakafan dewasa ini, dan kemungkinan munculnya masalah-masalah perwakafan untuk masa yang akan datang, oleh karena itu perlu penyuluhan dan informasi mengenai perwakafan disebarluaskan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

*Ketiga*, Masyarakat harus memahami berbagai macam pendekatan-pendekatan seperti lokakarya yang membahas tentang pentingnya ikut serta berpartisipasi dalam perwakafan tanah milik.

## **2. Upaya Peningkatan Sikap terhadap Perwakafan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap terhadap perwakafan berhubungan secara positif dan signifikan dengan partisipasi dalam perwakafan tanah milik dan memberikan kontribusi sebesar 3,25 persen. Selain itu secara diskriptif ditemukan pula bahwa sikap masyarakat terhadap perwakafan di Kota Makassar termasuk kurang positif. Hal ini terbukti karena 26 (43 %) responden yang skor sikapnya berada di bawah harga rata-rata, sehingga kondisi ini merupakan tantangan bagi pihak pengelola/institusi lembaga perwakafan untuk mengupayakan agar masyarakat dapat merubah sikap dan perilakunya terhadap perwakafan. Dengan perubahan sikap diharapkan peranserta masyarakat dalam perwakafan tanah milik itu juga semakin tinggi.

Dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam perwakafan dapat dilakukan dengan jalan berupaya mengubah dan memperbaiki ataupun meningkatkan sikap masyarakat terhadap perwakafan, maka hal-hal yang perlu dilakukan di antaranya memberikan informasi baik lewat media cetak dan elektronik serta penyuluhan yang berisikan pentingnya

mengeluarkan sebahagian harta bendanya berupa tanah milik untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan umum bidang sosial, seperti di atas tanah dibangun sebuah masjid, sekolah, kuburan, rumah sakit dan lain-lain di jalan Allah. merupakan suatu ibadah, amal jariyah yang kekal selama tanah wakaf itu tidak musnah dan dimanfaatkan sesuai ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Informasi seperti ini, apabila didengar dan diketahui oleh masyarakat juga terpanggil akan menyadarkannya setiap kali diperhadapkan pada kondisi yang ada pada dirinya.

### **C. Saran- Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan sehubungan dengan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perwakafan, sikap masyarakat terhadap perwakafan dalam rangka peranserta masyarakat untuk berpartisipasi dalam perwakafan tanah milik. Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Pertama*, kepada instansi yang berwenang, perlu membentuk dewan perwakilan nasional yang anggotanya terdiri wakil ulama, cendikiawan muslim dan pakar pengelolah

perwakafan yang membuat suatu konsepsi agar supaya lebih menyakinkan keberadaannya dalam menyikapi dan memberikan kontribusi ikut serta berpartisipasi terhadap perwakafan tanah milik .

*Kedua*, perlu mengadakan penyuluhan, seminar dan penataran baik bagi petugas lembaga wakaf, untuk diberikan kajian materi tentang pemahaman hal perwakafan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing, serta diupayakan materi tersebut dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk terdorong hatinya ikut berpartisipasi mewakafkan sebahagian tanah miliknya.

*Ketiga*, agar tanah wakaf diberdayakan menjadi salah satu sarana dalam pembangunan nasional dibidang agama khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya, sehingga pemahaman dalam hal ini dapat lebih ditingkatkan untuk berperan serta dalam mensosialisasikannya sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1988. *Manusia Dalam Sejarah Sebuah Pengantar Dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasim dan Daniel Dhakidae (ed). Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Abdurrahman. 1990. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Abustam, M. Idrus, dkk. 1996. *Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*: IKIP Ujung Pandang.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Alabij, al. A. 1997. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Prakteknya*. Jakarta: Rajawali Pres
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 1999. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahry, Oemar, 1983. *Tafsir Rahmat*, Jakarta: PT. Mutiara
- Basyir, Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Dakir. 1993. *Dasar-dasar Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dalyono, 1977. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Danin, Sudarman. 1997. *Metode Penelitian untuk Ilmu Ilmu Prilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Davis, K. dan Newstron, J., 1990. *Perilaku dalam Organisasi*, terjemahan A. Darma. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama R.I. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Departemen Agama R.I. 1991/1992. *Juklak Persertifikatan Tanah Wakaf*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf
- Djatnika, R. 1982. *Tanah Wakaf*, Surabaya, al-Ihlas
- Effendi, Rusli. 1991. *Teori Hukum*. Ujungpandang: Hasanuddin University Press.
- Friedman, M. Lawrence. 1975. *The Legal Sistem a Social Science Persfektive Russel* :New York: Sage Foundation
- Gulton, R.M.S., 1985, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Salatiga: Universitas Keristen Satyawacana.
- Haq, A. Faisal dan A. Saiful Anam. 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Surabaya: PT. GBI
- Haryono, Anwar. 1986. *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husaini dan Akbar, 1995. *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara
- Imam Muslim. 1955. *Sahih Muslim*. Mesir: Isa al-Babil – Halaby wa Syirkah.
- Mahalli, Jalaluddin, al. et. Al., *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.

- Marjono, 1985, *Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan*, Cipanas: Kerjasama Dep.Kes, PU, GTS.
- Mar'at. 1982. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Mertokusumo, Soedigno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyani, S., 1991. *Pengantar Ilmu Tanah Terbentuknya Tanah dan Tanah Pertanian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muslim Ibnu al-Hajjaj an-Naisabury al-Qusyairy. 206-207 H. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Qutub al-Alamiyah.
- Natawidjaya, Rachman, 1992, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Dikbud Dikti., Proyek IPTK.
- Ndraha, T., 1987, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bandung: Rineka Cipta.
- Parlindungan, AP., 1987. *Komentar Atas UUPA*, Bandung: Alumni Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Ranuhandoko. 1994. *Terminologi Hukum (Inggris Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafidia.
- Rafiq, Ahamad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salindeho, Jhon. 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saroso. 1994. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Hak Milik*. Yogyakarta: Liberty.
- Sarwono, Wirawan S., 1995, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1993, *Fiqh Sunnah..* Bandung: PT. Al-Ma'arif.

- Siddieqy, Hasby. 1970. *Hukum -Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti. 1997. Dalam Budianto. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudjana. 1992. *Tehnik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Tarsito.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekamto, Soerjono. 1983. *Himpunan Pearaturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Soehartono, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, M.dan Effendi,S. (ed). 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S Slavin, E.Robert. 1994. *Educational Psycologi Theori and Praktece*. America: John Hopkins University.
- Walgito, 1980, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM.
- Winkel, WS., 1989, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: PT. Gramedia.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Lampiran. 1

**KISI- KISI INSTRUMEN**  
**VARIABEL PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERWAKAFAN**

No	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Penyebaran Item	Jumlah
			Lama	
1.	Dasar hukum wakaf	- Al-Quran	1,11,21	3
		- Al-Hadis	2,12,22	3
		- Perundang-undangan di Indonesia	3,25,14	3
2.	Syarat-syarat wakaf	- Kejelasan tujuan	13,23	2
		- Jangka waktu tidak terbatas (untuk selama-lamanya)	5,15	2
		- Ada Ikrar Wakaf	6,16	2
3.	Macam-macam wakaf	- Wakaf Keluarga	4,17	2
		- Wakaf Umum	8,18	2
4.	Fungsi dan tujuan wakaf	- Kepentingan umum dalam bidang sosial	9,19,24	3
		- Ibadah	7,10,20	3
Jumlah total				25

## KISI- KISI INSTRUMEN VARIABEL

## SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PERWAKAFAN TANAH MILIK

No	Dimensi	Indikator	Penybaran Item		Jumlah
			Positif	Negatif	
1.	Kognisi	- Kewajiban dan amal jaryah	1, 13	7, 19	4
		- Lembaga pelaksana/petugas	2, 14	8, 20	4
2.	Afeksi	- Penerima dan pemberi wakaf	3, 15	9, 21	4
		- Ikrar wakaf	4, 16	10, 22	4
3.	Konasi	- Wakaf keluarga dan Umum	5, 17	11, 23	4
		- wakaf sebagai pahala dan pembinaan	6, 18	12, 24	4
Jumlah total					24

**KISI- KISI INSTRUMEN VARIABEL PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK**

No	Sub Variabel	Indikator	Penyebaran Item	Jumlah
1.	Partisipasi Keterlibatan fisik dan mental	- Pemberian kontribusi berupa materi dan tenaga	1,8,15,22	4
		- Kontribusi/pemberian buah –buah pikiran	2,9,16,	4
	Partisipasi bebas	- Spontan	3,10,17,23	4
		- Terinduksi (karena Penyuluhan )	4,11,18	3
	Partisipasi Paksaan atau tekanan	- Tekanan Hukum	5,12,19,24	4
		- Keadaan Sosial Ekonomi	6,13,20,25	4
		- Kebiasaan	7,14,21	3
Jumlah total				25



amiran 4. Analisis Uji Coba Tes Pemahaman

NO	Nomor Instrumen Pemahaman Masyarakat Tentang Perwakafan																										
Subjek	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	Y	Y <sup>2</sup>
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	15	225
2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	529
3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	19	361
4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	484
5	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	22	484
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	23	529
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	23	529
8	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	23	529
9	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	22	484
10	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	20	400
11	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	21	441
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	19	361
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	22	484
14	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	441
15	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	441
16	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	576
17	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	576
18	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	23	529
19	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	13	169
20	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	17	289
21	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	13	169
22	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12	144
23	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	12	144
24	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	14	196
25	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	12	144
26	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	11	121
27	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	11	121
28	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	10	100
Jumlah	17	21	17	20	16	17	19	22	24	22	22	24	24	21	24	20	23	19	18	16	16	21	22	21	20	508	9770.1

entukan Valid / tidak valid:

Didasarkan pada;  
Taraf signifikansi ( r Tabel) 5% Untuk n=28 adalah 0,317.  
Kriteria , Bila r tabel > r hitung berarti butir instrumen tidak valid.

bersambung...

	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25
	15	0	15	0	0	0	15	15	15	15	0	0	15	0	15	15	0	0	15	15	15	15	0
	0	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	19	0	19	19	19	19	19	19	19	0	19	19	19	19	19	0	0	19	0	0	19	19	19
	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22
	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	23	23	23	23	23
	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	0	23	23	23	23
	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	0
	20	20	0	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	20	0	20	20	20
	21	21	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	21	21	0	21	21	21	0	21	21
	19	19	19	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	19	19	0	0	19	19	0	19
	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	0	22	0	22
	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22
	0	21	0	21	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23	0	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	13	0	13	13	13	0	13	0	0	13	0	0	13	13	13	0	0	13	0	0	0	13	13
	0	17	0	0	17	17	17	17	17	17	17	0	17	0	17	17	0	0	17	17	17	17	17
	13	13	0	13	13	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	13	0	0	13	13	0	13	13
	0	18	0	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	0	0	18	0
	0	12	0	0	0	0	12	0	12	12	12	12	12	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0
	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	12	12	12	12	0	12	12	12	0	12	12	0	12
	0	14	14	0	14	14	14	0	14	14	14	14	14	0	14	0	14	0	0	14	0	0	14
	12	0	0	0	12	12	12	0	12	0	0	12	0	12	12	0	0	12	12	0	12	12	0
	0	0	0	0	11	0	0	11	0	11	11	11	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11
	0	11	0	0	11	11	11	0	0	0	11	0	11	11	0	11	11	0	0	11	0	0	11
	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	10	10	10	0
4	337	379	330	335	358	432	480	433	436	452	455	384	450	383	439	367	348	314	315	403	409	414	386
14	19.824	18.950	20.625	19.706	18.842	19.836	19.167	19.682	19.818	18.833	18.958	18.782	18.750	19.150	19.067	19.316	19.222	18.623	19.633	19.190	18.691	19.714	19.300
20	0.807	0.714	0.571	0.607	0.679	0.786	0.857	0.786	0.788	0.857	0.857	0.750	0.857	0.714	0.821	0.679	0.643	0.571	0.571	0.750	0.788	0.750	0.714
30	0.393	0.288	0.429	0.393	0.321	0.214	0.143	0.214	0.214	0.143	0.143	0.250	0.143	0.288	0.179	0.321	0.357	0.429	0.429	0.250	0.214	0.250	0.288
38	0.239	0.204	0.245	0.239	0.218	0.168	0.122	0.168	0.168	0.122	0.122	0.188	0.122	0.204	0.147	0.218	0.230	0.245	0.245	0.168	0.168	0.168	0.204

Y

)) = 4.788  
a y/n = 18.071  
= 4.815  
= 23.180

97	0.482	0.289	0.612	0.422	0.233	0.622	0.657	0.640	0.605	0.388	0.451	0.248	0.345	0.354	0.452	0.376	0.321	0.373	0.388	0.403	0.207	0.691	0.405
id	Valid	out	Valid	Valid	out	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	out	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	out	Valid	Valid
	3	-	4	5	-	6	7	8	9	10	11	-	12	13	14	15	16	17	18	19	-	20	21

y means of KR - 20 Analysis  
92 Andai

## Lampiran 5. Analisis Hasil Uji coba Instrumen Sikap

bersambung

NO	Sikap Masyarakat Terhadap Perwakafan Tanah Milik (X)														
Siswa	X1	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18
1	3	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	2	2	5
2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2	4	5
3	2	3	3	3	3	2	5	3	4	5	2	4	3	3	3
4	3	3	5	4	5	2	4	5	4	2	3	3	4	4	3
5	3	4	3	2	3	5	3	2	5	3	5	3	2	2	3
6	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	3
7	4	5	5	5	5	4	3	4	4	3	3	4	3	2	3
8	3	5	5	5	5	4	3	5	5	5	3	4	4	4	5
9	3	2	3	5	3	4	5	3	4	3	4	2	5	3	3
10	5	5	4	4	5	5	3	4	5	3	5	5	5	5	2
11	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2
12	3	3	3	4	5	3	3	4	3	4	3	5	5	5	3
13	5	3	3	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
14	3	5	3	4	5	3	5	3	4	3	4	4	5	4	4
15	3	2	4	4	3	4	4	3	4	4	2	2	4	4	2
16	4	5	5	5	3	5	3	2	2	4	3	4	2	4	3
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4
18	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3
19	3	4	4	5	3	4	5	5	3	5	3	4	4	4	3
20	3	3	4	5	5	2	5	4	4	5	3	4	4	4	3
21	3	4	3	5	4	5	4	5	4	5	5	5	3	4	2
22	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5
23	5	3	3	5	5	5	5	3	5	4	3	5	4	4	3
24	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	3	3	4	3	4
25	4	3	5	3	2	4	5	3	4	3	3	4	3	4	4
26	4	3	3	5	5	4	5	4	4	3	3	3	5	4	3
27	5	4	4	5	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4	5
28	4	4	2	5	5	5	5	3	5	3	4	4	3	4	3
X	106	105	110	124	119	113	122	109	118	110	104	112	105	106	96
X <sup>2</sup>	424	419	454	568	533	483	550	451	514	456	412	468	421	426	356
/arians	0.8	0.9	0.78	0.67	0.97	0.96	0.66	0.95	0.6	0.85	0.92	0.71	0.97	0.88	0.96

## Penentuan Valid / tidak valid

Didasarkan pada;

Taraf signifikansi ( r tabel ) 5% Untuk n=28 adalah 0,317.

Kriteria, Bila r tabel &gt; r hitung berarti butir instrumen tidak valid.

bersambung

sambungan

X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	Y	Y^2
5	5	3	4	4	4	5	109	11881
5	5	5	5	5	5	5	114	12996
5	2	5	2	4	2	3	83	6889
3	4	4	3	4	4	4	87	7569
5	5	5	4	2	2	4	83	6889
5	5	5	5	4	5	2	109	11881
4	4	4	5	2	4	3	93	8649
5	4	5	5	4	4	3	108	11664
2	5	3	5	4	4	4	89	7921
5	5	4	5	5	4	5	110	12100
3	5	5	5	3	3	5	109	11881
4	5	3	2	5	2	4	88	7744
5	5	5	5	5	4	5	118	13924
4	4	3	4	4	3	4	96	9216
3	4	4	4	3	2	4	84	7056
2	3	4	4	3	5	4	92	8464
3	5	5	5	2	5	5	115	13225
4	4	5	4	5	5	3	91	8281
4	4	4	5	4	4	3	97	9409
3	4	4	5	2	4	4	98	9604
3	4	4	5	4	3	4	99	9801
5	5	4	5	4	2	5	114	12996
3	5	5	5	4	2	5	105	11025
4	2	3	4	5	3	4	94	8836
4	4	2	5	4	5	4	94	8836
3	4	2	5	4	3	5	95	9025
3	4	5	5	5	4	5	105	11025
3	5	2	3	3	5	2	92	8464
107	120	112	123	107	102	113	2771	277251
435	534	476	563	435	404	479	11621	
0.93	0.7	1	0.81	0.93	1.16	0.82	21.754	

A. UJI VALIDITAS BUTIR

Dengan rumus KKP  
di dapat ;

No	r	Ket	No.Baru
1	0.721	Valid	1
2	0.510	Valid	2
3	0.618	Valid	3
4	0.618	Valid	4
5	0.358	Valid	5
6	0.307	Drop	*
7	0.546	Valid	6
8	0.489	Valid	7
9	0.428	Valid	8
10	0.247	Drop	*
11	0.595	Valid	9
12	0.513	Valid	10
13	0.413	Valid	11
14	0.548	Valid	12
15	0.602	Valid	13
16	0.097	Drop	*
17	0.376	Valid	14
18	0.511	Valid	15
19	0.327	Valid	16
20	0.481	Valid	17
21	0.351	Drop	*
22	0.620	Valid	18
23	0.213	Drop	*
24	0.460	Valid	19
25	0.460	Valid	20

B. UJI RELIABILITAS

Varians tot =  $[545946 - [4634^2/40]]/40$  = 107.892

Uji reliabilitas Dengan permulasi Rumus K.Alf Krombach  
Yaitu:  $=(25/(25-1))*(1-99,004/2120.67)$  = 0.798 ( Andel)

NO	Nomor Instrumen Partisipasi masyarakat Pada Perwakafan Tanah(Y)																
Subyek	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17
1	3	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
2	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	2	5	3	4	2	3	3	5	3	3	3	4	3	2	4	2	3
4	5	3	3	1	2	3	4	3	5	3	5	4	2	3	3	4	4
5	3	3	3	4	5	3	4	3	4	4	4	5	5	5	3	5	5
6	5	5	4	4	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5
7	4	4	4	4	5	3	5	5	4	5	4	4	5	5	4	3	4
8	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4
9	3	4	3	3	4	3	5	3	4	5	3	4	4	4	4	5	3
10	5	5	3	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
11	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
12	3	4	3	3	3	3	4	4	5	3	4	3	4	3	5	5	5
13	5	5	5	5	3	3	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5
14	3	4	3	4	5	3	4	5	3	5	3	4	3	4	4	3	4
15	3	4	4	3	3	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4
16	4	5	5	3	5	5	5	3	5	3	5	4	4	3	4	5	4
17	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5
18	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	5
19	5	3	3	4	4	4	5	3	4	5	5	3	5	3	4	4	4
20	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	5	3	4	3	4
21	4	4	3	4	4	3	5	4	5	4	5	4	5	2	5	3	4
22	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5
23	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5
24	3	5	3	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	5	3	5	4
25	3	4	5	3	3	5	3	5	5	5	5	4	3	5	4	3	5
26	4	3	3	5	3	3	5	5	5	5	5	4	2	5	5	5	4
27	4	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	3	5	4	5	5
28	5	4	3	3	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	4	3	5
X	112	119	110	108	105	109	126	125	126	127	123	120	113	115	118	111	124
X^2	472	519	456	436	423	443	580	577	580	591	557	526	485	499	508	459	560
Varians	0.86	0.47	0.85	0.69	1.04	0.67	0.46	0.68	0.46	0.53	0.60	0.42	1.03	0.95	0.38	0.68	0.39

Penentuan Valid / tidak valid Instrumen ini  
Yaitu bedasar pada  
Taraf signifikansi ( r Tabel) 5% Untuk n=28 adalah 0,317.  
Kriteria , Bila r tabel > r hitung berarti butir instrumen tidak valid.

bersambung...

Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	Y	Y^2
5	4	5	4	4	5	4	5	115	13225
5	5	5	5	5	5	5	5	118	13924
2	5	5	4	4	2	4	4	84	7056
3	3	4	4	3	4	4	4	86	7396
3	5	5	5	4	5	5	4	104	10816
3	5	5	5	5	4	5	5	112	12544
3	4	4	4	5	4	4	3	103	10609
5	5	4	5	5	4	4	5	113	12769
3	4	5	3	2	4	4	5	94	8836
5	5	5	4	5	5	4	5	116	13456
5	4	5	5	5	4	5	5	116	13456
3	4	5	3	5	3	4	4	95	9025
4	5	5	5	5	5	4	5	116	13456
4	4	4	3	4	3	3	4	93	8649
3	5	4	4	4	1	2	4	93	8649
3	4	3	4	4	5	5	4	104	10816
4	4	5	5	5	5	5	5	119	14161
3	4	4	5	4	5	5	4	97	9409
3	4	4	4	5	4	4	4	100	10000
3	4	4	4	5	5	4	4	106	11236
4	4	4	2	1	5	3	4	95	9025
5	3	5	2	5	4	5	5	113	12769
5	5	5	5	5	3	5	5	116	13456
4	4	5	5	2	5	5	5	103	10609
5	4	4	5	1	3	5	4	101	10201
5	5	5	5	2	3	4	5	105	11025
5	5	4	4	5	2	4	4	109	11881
4	5	5	5	2	3	5	2	104	10816
109	122	127	118	111	110	120	122	2930	3E+05
449	542	585	520	489	466	530	546	12798	
0.88	0.37	0.32	0.81	1.75	1.21	0.56	0.52	17.597	

### A. UJI VALIDITAS BUTIR

Dengan rumus KKP

di dapat ;

No.lama	r	Ket	No.baru
1	0.5020	Valid	1
2	0.4496	Valid	2
3	0.6474	Valid	3
4	0.5473	Valid	4
5	0.2775	Drop	*
6	0.5284	Valid	5
7	0.5317	Valid	6
8	0.4209	Valid	7
9	0.4888	Valid	8
10	0.5124	Valid	9
11	0.5402	Valid	10
12	0.6442	Valid	11
13	0.4691	Valid	12
14	0.5289	Valid	13
15	0.4268	Valid	14
16	0.2341	Drop	*
17	0.5835	Valid	15
18	0.6780	Valid	16
19	0.2673	Drop	*
20	0.3645	Valid	17
21	0.3988	Valid	18
22	0.4723	Valid	19
23	0.4103	Valid	20
24	0.4683	Valid	21
25	0.5025	Valid	22

### B. UJI RELIABILITAS

$$\text{Varians total} = [263143 - [2682^2/28]]/ = 95.230$$

Uji reliabilitas dengan menggunakan Rumus K.Alfalfa Krombach

Yaitu :

$$(25/(25-1)) * (1 - 68.206/229.902) = 0.8152 \text{ (Andal)}$$

...sambungan

Lampiran 7:

## INSTRUMEN PENELITIAN

# **Lampiran ... INSTRUMEN BAGIAN A**

## **Petunjuk Pengisian:**

Pada instrumen bagian A ini, Bapak/ibu di minta untuk memilih alternatif jawaban yang terdiri dari option a, b, c, d, dengan cara memberi tanda silang (X) pada lembar jawaban yang tersedia yang menurut Anda benar atau paling benar.

1. Dalam Surah Al Baqarah Ayat 267 menjelaskan tentang perintah:

- a. shalat
- b. wakaf
- c. zakat
- d. haji

2. Ada tiga amalan yang tidak putus:

- a. zadaqah jariah
- b. naik haji
- c. shalat
- d. zakat

3. Dasar hukum wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor:

- a. No. 25 Tahun 1969
- b. No. 26 Tahun 1970
- c. No. 27 Tahun 1975
- d. No. 28 Tahun 1977

4. Syarat-syarat wakaf diantaranya adalah:

- a. tidak terikat oleh waktu
- b tidak lebih dari seperempat jumlah tanah yang dimiliki
- c. mudah diperjual belikan
- d. tanah yang sudah disertifikatkan



5. Ikrar wakaf adalah salah satu:
- a. sunnat wakaf
  - b. rukun wakaf
  - c. wajib wakaf
  - d. syarat wakaf
6. Wakaf yang tidak bisa diserahkan kepada keluarga disebut:
- a. wakaf keturunan
  - b. wakaf keluarga
  - c. wakaf harta
  - d. wakaf umum
7. Wakaf merupakan suatu perwujudan darma bakti kepada, kecuali:
- a. negara
  - b. agama
  - c. masyarakat umum
  - d. orang tua
8. Disisi Allah, wakaf merupakan suatu perbuatan yang bernilai:
- a. pahala
  - b. pengabdian
  - c. kewajiban
  - d. keharusan
9. *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kesempurnaan Iman sebelum menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai”*;: ayat ini menunjukkan:
- a. kewajiban berwakaf
  - b. perintah berwakaf
  - c. tujuan berwakaf
  - d. cara-cara berwakaf

10. Dalam sebuah hadits yang cukup shahih dinyatakan bahwa bila ingin harta kita jadi kekal, maka sedekahkanlah dalam bentuk wakaf hal ini berarti:
- wakaf merupakan amal jariyah
  - wakaf akan membuat reski bertambah
  - wakaf merupakan harta yang tidak pernah habis
  - wakaf akan membuat orang terkenal
11. Bagi orang yang berwakaf disyaratkan:
- ada saksi dari pemerintah
  - ada jaminan
  - sukarela/tidak karena terpaksa
  - ada dukungan dari keluarga
12. Wakaf dapat di tarik kembali bilamana :
- barang yang diwakafkan sangat dibutuhkan oleh wakif
  - ingin dijadikan harta warisan
  - penggunaannya tidak sesuai lagi dengan ketentuan ikrar wakaf
  - tidak pernah diurus sertifikatnya
13. Yang dimaksud dengan “ikrar wakaf” adalah:
- perjanjian tentang jangka waktu berlakunya wakaf
  - perjanjian antara yang memberi dan menerima wakaf
  - perjanjian antara pemberi wakaf dengan pemerintah
  - perjanjian antara saksi dengan yang menerima wakaf
14. Ikrar wakaf antara pemberi dan penerima wakaf dapat di lakukan dalam lingkungan keluarga sendiri, apabila:
- wakaf tersebut adalah wakaf umum
  - wakaf tersebut adalah wakaf keluarga
  - tanah yang diwakafkan bermasalah
  - tanah yang diwakafkan belum disertifikat

15. Wakaf “khairiyah” diperuntukkan untuk:

- a. kepentingan umum
- b. kepentingan pribadi
- c. kepentingan keluarga
- d. kepentingan perorangan

16. Pada hakekatnya tujuan wakaf, di samping sebagai ibadah dapat pula memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah, karena:

- a. fungsi wakaf adalah membimbing masyarakat membangun rumah ibadah
- b. fungsi wakaf adalah membimbing masyarakat ke arah perbaikan ekonomi
- c. fungsi wakaf adalah menanamkan kesadaran masyarakat untuk berkorban
- d. fungsi wakaf adalah menumbuhkan rasa kekeluargaan

17. Dalam surah Ali Imran ayat 92 menjelaskan bahwa seseorang dikatakan beriman apabila mewakafkan hartanya:

- a. yang dimiliki
- b. yang dicintai
- c. yang disukai orang
- d. yang tidak digunakan

18. Hadits dari Ibnu Umar tentang penggunaan tanah wakaf pada dasarnya:

- a. tidak boleh dijual
- b. boleh dimiliki
- c. boleh diwakafkan kembali
- d. boleh diwariskan

19. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 secara khusus mengatur tentang:

- a. perwakafan tanah milik
- b. penyertifikatan tanah
- c. hak sewa tanah
- d. hak guna tanah

20. Hakekat Wakaf adalah:

- a. kepentingan pribadi
- b. kepentingan pemerintah
- c. kepentingan umum
- d. kepentingan perorangan

21. Mewakafkan tanah milik sebagai realisasi pelaksanaan dari rukun Islam :

- a. ke lima
- b. ke dua
- c. ke empat
- d. ke tiga

Lampiran. **INSTRUMEN BAGIAN. B**

**Petunjuk Pengisian**

.. Instrumen bagian B ini bapak/ibu diminta untuk menjawab semua pernyataan berdasarkan Sikap anda .dengan cara memberi ceklis atau tanda silang ( x ) pada lembar jawaban yang tersedia yaitu:

SS : Apabila anda sangat setuju pada pernyataan tersebut

S : Apabila anda setuju pada pernyataan tersebut

R : Apabila anda ragu memberikan kepastian

TS : Apabila anda kurang sesuai dengan pernyataan tersebut

STS : Apabila anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut

No	Butir Pernyataan	Alternatif Sikap				
		SS	S	R	TS	STS
1	Sebagai seorang yang beriman kepada Allah,sebaiknya menafkahkan sebahagian resaknya di jalan Allah,					
2	Setelah kita meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak-anak kita yang shaleh,					
3	Scorang pewakaf yang ingin mewakafkan tanah miliknya tidak perlu dipersulit serta pemungutan biaya,					
4	Untuk mempermudah urusan perwakafan, maka perlu di bentuk lembaga-lembaga wakaf pada tiap-tiap kecamatan,					
5	Penyuluhan dari petugas wakaf sebaiknya di realisasikan (dipraktekkan) terhadap diri kita sebagai seorang yang beriman,					

6	Harta tanah milik yang sudah di ikrarkan untuk di wakafkan tidak perlu lagi kita berusaha untuk mengambilnya kembali					
7	Syarat utama bagi pewakaf dan penerima wakaf adalah keduanya harus baligh,					
8	Pemberi dan penerima wakaf bisa saja dilakukan dalam rumpun keluarga sendiri,					
9	Wakaf dapat di anggap sebagai suatu ibadah,					
10	Sebenarnya wakaf dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan ukhuwah Islamiyah,					
11	Sebagai seorang Islam, tidak perlu lagi merepotkan diri menafkahkan sebahagian reskinya pada orang lain yang penting beriman pada Allah,					
12	Setelah kita meninggal dunia, saya belum yakin kalau amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak-anak yang shaleh dapat menolong kita dalam kubur.					
13	Bila seseorang ingin mewakafkan tanah miliknya maka tidak ada salahnya meminta uang administrasi, karena mereka itu termasuk orang mampu,					
14	Penyuluhan dari petugas wakaf tidak perlu terlalu di hiraukan dan dipraktikkan terhadap diri kita sebab belum tentu kebenarannya					
15	Bila seseorang ingin mewakapkan hartanya tidak perlu mengetahui tujuan penggunaan dari penerima wakaf					

16	Harta tanah milik yang sudah di ikrarkan untuk di wakafkan boleh saja di ambil kembali bila kita sangat membutuhkannya.					
17	Masalah umur (baligh) tidak perlu dijadikan syarat utama bagi pewakaf dan penerima wakaf					
18	Pemberi dan penerima wakaf tidak bisa dilakukan dalam rumpun keluarga sendiri.					
19	Tanah milik yang telah di wakafkan tidak ada salahnya bila digunakan untuk kepentingan pribadi.					
20	Wakaf tidak dapat di fungsikan sebagai sarana pembinaan ukhuwah Islamiyah,					

**Lampiran INSTRUMEN BAGIAN. C****Petunjuk Pengisian:**

Pada instrumen bagian C ini bapak/ibu di minta untuk memilih alternatif jawaban yang terdiri dari obtion a, b, c, d, e dengan cara memberi (X) pada lembar jawaban yang tersedia berdasarkan kebiasaan-kebiasan anda.

1. Sebagai seorang muslim, pernahkah anda mewakafkan sebahagian tanah miliknya, meskipun tanah tersebut harganya cukup mahal
  - a. selalu.
  - b. sering
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
2. Pernahkah anda memberikan petunjuk kepada orang yang ingin mewakafkan tanah miliknya
  - a. selalu
  - b. sering
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
3. Apakah anda pernah mewakafkan sebahagian tanah miliknya
  - a. selalu
  - b. sering
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah



4. Apakah anda mewakafkan tanah miliknya setelah mendapat ceramah tentang kemuliaan seorang pewakaf di sisi Allah
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
5. Masalah wakaf telah digariskan dalam al-qur'an dan hadis, apakah anda mewakafkan tanah miliknya karena takut di hisab Allah di hari kemudian
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
6. Dalam mewakafkan tanah miliknya, apakah karena anda ingin membuktikan kedarmawaannya kepada masyarakat
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
7. Dilingkungan sahabat saya pada umumnya sudah mewakafkan sebahagian tanah miliknya karena itu saya juga turut berwakaf
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah

8. Sebagai seorang pemilik tanah yang cukup luas, pernahkah anda mewakafkan sebahagian dari tanah milik tersebut
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
9. Pernahkah anda mengajak keluarganya untuk berwakaf
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
10. Pernahkah anda menemani/menuntun keluarga yang sedang mengurus tanahnya untuk di wakafkan
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
11. Apakah anda mewakafkan tanahnya setelah mendapat penyuluhan dari pihak pengelola wakaf
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah

16. Pernahkah anda memberikan penjelasan kepada keluarganya tentang kemuliaan seorang pewakaf di sisi Allah
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
17. Sebagai seorang yang mengerti tentang perwakafan menurut Islam apakah pernah berinisiatif untuk mendorong warga masyarakat untuk mewakafkan tanah miliknya
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah.
18. Apakah anda sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kegunaan wakaf
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah
19. Di Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum maka masalah perwakafan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, apakah anda berwakaf karena berdasar peraturan tersebut
- selalu
  - sering
  - kadang-kadang
  - jarang
  - tidak pernah

20. Apakah anda mewakafkan tanahnya karena tidak mau di cap sebagai orang kikir atau pelit
- a. selalu
  - b. sering
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
21. Apakah anda mengingatkan nadzir agar tanah yang diwakafkan secepat mungkin diurus administrasinya
- a. selalu
  - b. sering
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
22. Karena adanya penyuluhan tentang wakaf mendorong anda berpartisipasi dalam hal perwakafan
- a. selalu
  - b. sering
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah

*Terima kasih, semoga sukses selalu*

Lampiran 8.

**DATA MENTAH HASIL  
PENELITIAN**

SAS 10:12 Minggu. Juli 14, 2002 ML

OBS	X1	X2	Y
1	6	75	68
2	7	72	68
3	5	79	67
4	13	83	89
5	8	76	63
6	11	80	77
7	12	89	70
8	12	71	70
9	11	73	68
10	15	84	100
11	14	89	95
12	13	72	71
13	11	74	72
14	11	74	67
15	9	74	61
16	11	73	61
17	8	79	54
18	12	79	79
19	11	80	81
20	10	77	81
21	9	90	78
22	10	81	65
23	14	79	83
24	13	81	92
25	12	79	73
26	13	81	72
27	10	73	67
28	11	71	98
29	10	76	66
30	6	80	46
31	8	76	75
32	18	80	79
33	10	76	62
34	6	77	57
35	13	89	78
36	14	85	53
37	14	80	83
38	11	80	66
39	13	71	83
40	13	89	80
41	13	80	80
42	13	89	74
43	9	73	63
44	16	86	87
45	13	76	56
46	11	73	49
47	14	88	84
48	11	83	79

bersambung...

49	13	69	74
50	11	87	75
51	9	82	63
52	10	74	67
53	7	72	54
54	14	84	91
55	12	76	77
56	15	93	87
57	9	83	48
58	9	76	80
59	11	78	75
60	13	81	79

Lampiran 9

HASIL ANALISIS DATA



## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=X1

## Moments

N	60	Sum Wgts	60
Mean	11.18333	Sum	671
Std Dev	2.639284	Variance	6.965819
Skewness	-0.21116	Kurtosis	0.061854
USS	7915	CSE	410.9833
CV	23.60015	Std Mean	0.34073
T:Mean=0	32.82168	Prob> T	0.0001
Sgn Rank	915	Prob> S	0.0001
Num C=0	60		
W:Normal	0.970141	Prob<W	0.3084

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=X1

## Quantiles(Def=5)

100% Max	18	99%	18
75% Q3	13	95%	15
50% Med	11	90%	14
25% Q1	9.5	10%	7.5
0% Min	5	5%	6
		1%	5
Range	13		
Q3-Q1	3.5		
Mode	11		

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=X1

## Extremes

Lowest	Obs	Highest	Obs
5(	3)	14(	54)
6(	34)	15(	10)
6(	30)	15(	56)
6(	1)	16(	44)
7(	53)	18(	32)

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=X2

## Moments

N	60	Sum Wgts	60
Mean	79.16667	Sum	4750
Std Dev	5.796453	Variance	33.59887
Skewness	0.448036	Kurtosis	-0.57811
USS	378024	CSS	1982.333
CV	7.321836	Std Mean	0.748319
T:Mean=0	105.7927	Prob> T	0.0001
Sen Rank	915	Prob> S	0.0001
Num = 0	60		
W:Normal	0.948126	Prob<W	0.0247

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=X2

## Quantiles(Def=5)

100% Max	93	99%	93
75% Q3	83	95%	89
50% Med	79	90%	89
25% Q1	74	10%	72
0% Min	69	5%	71
		1%	69
Range	24		
Q3-Q1	9		
Mode	76		

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=X2

## Extremes

Lowest	Obs	Highest	Obs
69(	49)	89(	35)
71(	39)	89(	40)
71(	28)	89(	42)
71(	8)	90(	21)
72(	53)	93(	56)

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=Y

## Moments

N	60	Sum Wgts	60
Mean	72.66667	Sum	4360
Std Dev	12.22066	Variance	149.3446
Skewness	-0.05236	Kurtosis	-0.20278
USS	325638	CSS	8811.333
CV	16.81743	Std Mean	1.577681
T:Mean=0	46.05916	Prob> T	0.0001
Sgn Rank	915	Prob> S	0.0001
Num = 0	60		
W:Normal	0.98092	Prob<W	0.7143

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=Y

## Quantiles(Def=5)

100% Max	100	99%	100
75% Q3	80	95%	93.5
50% Med	73.5	90%	88
25% Q1	65.5	10%	55
0% Min	46	5%	51
		1%	46
Range	54		
Q3-Q1	14.5		
Mode	67		

## UNIVARIATE PROCEDURE

Variable=Y

## Extremes

Lowest	Obs	Highest	Obs
46(	30)	91(	54)
48(	57)	92(	24)
49(	46)	95(	11)
53(	36)	98(	28)
54(	53)	100(	10)

## CORRELATION ANALYSIS

3 'VAR' Variables: X1 X2 Y

## Simple Statistics

Variable	N	Mean	Std Dev	Sum
X1	60	11.18333	2.63928	671.00000
X2	60	79.16667	5.79645	4750
Y	60	72.66667	12.22066	4360

## Simple Statistics

Variable	Minimum	Maximum
X1	5.00000	18.00000
X2	69.00000	93.00000

## CORRELATION ANALYSIS

## Simple Statistics

Variable	Minimum	Maximum
Y	46.00000	100.00000

## CORRELATION ANALYSIS

Pearson Correlation Coefficients / Prob &gt; |R| under Ho: Rho=0 / N = 60

	X1	X2	Y
X1	1.00000 0.0	0.37909 0.0028	0.58522 0.0001
X2	0.37909 0.0028	1.00000 0.0	0.33410 0.0091
Y	0.58522 0.0001	0.33410 0.0091	1.00000 0.0

Model: MODEL1

Dependent Variable: Y

## Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
Model	2	3147.43231	1573.71616	15.837	0.0001
Error	57	5663.90102	99.36668		
C Total	59	8811.33333			

Root MSE	9.96828	R-square	0.3572	<i>Koefisien Determinasi</i>
Dep Mean	72.66667	Adj R-sq	0.3346	
C.V.	13.71782			

## Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	T for H0: Parameter=0	Prob >  T
INTERCEP	1	23.055756	17.82002450	1.294	0.2009
X1	1	2.479660	0.53136973	4.667	0.0001
X2	1	0.276380	0.24194719	1.142	0.2581

Model: MODEL1

Dependent Variable: Y

## Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	<i>F hitung</i> F Value	<i>F tabel</i> Prob>F
Model	1	3017.77066	3017.77066	30.211	0.0001
Error	58	5793.56267	99.88901		
C Total	59	8811.33333			
Root MSE	9.99445	R-square	0.3425	<i>Arus masuk Regresi</i>	
Dep Mean	72.66667	Adj R-sq	0.3312	<i>Koefisien Determinasi</i>	
C.V.	13.75383			<i>(Kalkulasi t-hub)</i>	

## Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	T for H0: Parameter=0	Prob >  T
INTERCEP	1	42.362505	5.66234840	7.481	0.0001
X1	1	2.709761	0.49299981	5.496	0.0001

*Model Regresi**T. Hitung*

bersambung

Model: MODEL1  
Dependent Variable: Y

## Analysis of Variance

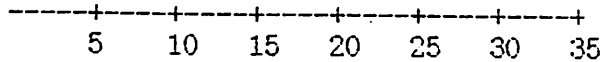
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob. F
Model	1	983.56152	983.56152	7.288	0.0091
Error	58	7827.77182	134.96152		
Total	59	8811.33333			
Root MSE	11.61730	R-square	0.1116		
Dep Mean	72.66667	Adj R-sq	0.0963		
C.V.	15.98711				

## Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	T for H0: Parameter=0	Prob >  T
INTERCEP	1	16.902556	20.71098725	0.816	0.4178
X2	1	0.704389	0.2092563	2.700	0.0091

## FREQUENCY OF X1

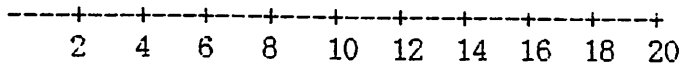
X1 MIDPOINT		FREQ	CUM FREQ	PERCENT	CUM PERCENT
7.17	*****	15	15	25.00	25.00
11.50	*****	35	50	58.33	83.33
15.84	*****	10	60	16.67	100.00



FREQUENCY

## FREQUENCY OF X2

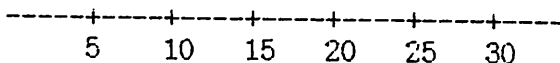
X2 MIDPOINT		FREQ	CUM FREQ	PERCENT	CUM PERCENT
71.4	*****	12	12	20.00	20.00
76.2	*****	15	27	25.00	45.00
81.0	*****	20	47	33.33	78.33
85.8	*****	6	53	10.00	88.33
90.6	*****	7	60	11.67	100.00



FREQUENCY

## FREQUENCY OF Y

Y MIDPOINT		FREQ	CUM FREQ	PERCENT	CUM PERCENT
55	*****	14	14	23.33	23.33
73	*****	34	48	56.67	80.00
91	*****	12	60	20.00	100.00



FREQUENCY

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nama : Drs. MUKHTAR LUTFI. M.Pd  
NIP : 150246414  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I /III/d  
Tempat Tugas : Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar  
Alamat/Tip : Jl. Skarda N.II/10 Makassar

menyatakan kesediaan melaksanakan Penelitian dengan judul :  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK (Studi Korelasional  
Antara Pemahaman dan Sikap Dengan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwakafan  
Tanah Milik di Kota Makassar)

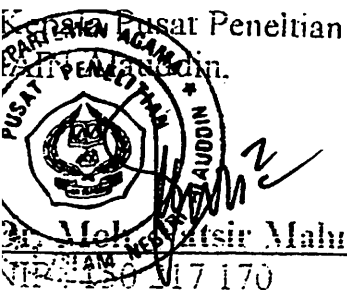
dengan biaya DIKS IAIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2002. sebesar  
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penelitian ini adalah  
penelitian Mandiri, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan  
2 Desember 2002. Kami bersedia menyelesaikan penelitian dalam jangka  
waktu tersebut dengan mengikuti segala ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dengan  
penuh rasa tanggung jawab.

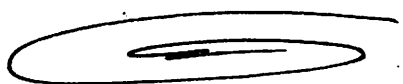
Makassar. 01 Mei 2002

Diketahui

Ket. Pusat Penelitian  
IAIN Alauddin.

  
M. Mutsir Mahmud, MA.  
NIP: 150117170

Yang menyatakan

  
Drs. MUKHTAR LUTFI. M.Pd.  
NIP: 150246414

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kabag. Keuangan IAIN Alauddin di Makassar
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip.-



**DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864928-864931 Makassar

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN**

Nomor: 40 Tahun 2002

*tentang*

**PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN KONSULTAN  
PENELITI  
BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2002**

**REKTOR IAIN ALAUDDIN**

*Setelah*

**menimbang :**

1. Bahwa dalam tahun anggaran 2002, dosen IAIN Alauddin Makassar akan melaksanakan penelitian.
2. Bahwa untuk melaksanakan penelitian tersebut dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
3. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan penelitian.

**meningat :**

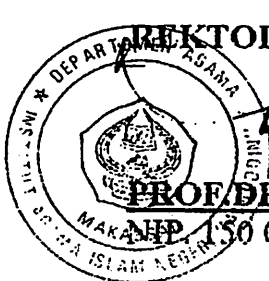
1. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 232 tahun 1991 dan No.289 tentang wewenang menandatangani Surat Keputusan.
4. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 389 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin.
5. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 403 tentang Statuta IAIN Alauddin
6. Surat Dirjen Binbaga Islam Departememn Agama R.I. Nomor E/TI.00/A7/1878 A/1998 tanggal 29 Mei tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penelitian

**meningat pula :** Hasil pemeriksaan Tim Penyeleksi Proposal penelitian IAIN Alauddin tanggal 18 April 2002

**MEMUTUSKAN.**

- menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENELITI/KETUA PENELITI, JUDUL PENELITIAN DAN KONSULTAN PENELITI BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN TAHUN 2002
- utama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai peneliti/ketua peneliti dan konsultan.
- dua : Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) IAIN Alauddin tahun anggaran 2002
- tiga : Waktu pelaksanaan penelitian selama 7 (tujuh) bulan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 2 Desember 2002.
- empat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- lima : Surat Keputusan ini berlaku sesuai tanggal penetapannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
 PADA TANGGAL : 25 April 2002

REKTOR, *h*  
  
*Whe...*  
**PROF. DR. H.ABD. MUIN SALIM** *ll*  
 NIP. 150 036 706

mbusan:  
 ampaikan kepada Yth.  
 Sekjen Departemen Agama R.I. di Jakarta.  
 Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. di Jakarta.  
 Ditbinperta Islam Departemen Agama R.I. di Jakarta  
 Kepala KPKN II Makassar.  
 arta Dekan dalam lingkungan IAIN Alauddin.  
 endaharawan DIKS IAIN Alauddin Makassar.  
 epala Pusat Penelitian Alauddin Makassar

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN ALAUDDIN**  
**NOMOR: 40 TAHUN 2002**

tentang

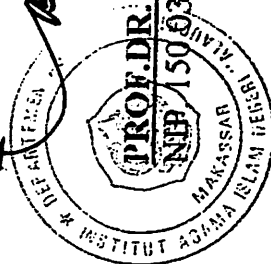
**PENELITI/KETUA PENELITIAN, JUDUL PENELITIAN DAN PEMBIMBING**  
**PENELITIAN BIAYA DIKS IAIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**TAHUN 2002**

<b>NO</b>	<b>PENELITI/KETUA PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JENIS PEN.</b>	<b>PEMBIMBING</b>
1	Dra. Soraya Rasyid, M.Pd. Nip. 150 275 557 / III/b	Tuntutan PERMESTA Tentang Otonomi Daerah Sulawesi (1957-1961)	Adab	Mandiri	Prof.Dr.H.M. Radhi Al-Hafid, MA
2	Andi Miswar, S.Ag. M.Pd. Nip. 150 291 143 /III/a	Karakteristik Sigat Al-Nahwu dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum	Adab	Mandiri	Prof.Dr. H.A. Muin Salim
3	Dra. Marwati, M.Ag. Nip. 150 254 613/III/b	Tobat dalam Al-Qur'an	Adab	Mandiri	Prof. Dr. H. Mappa-nganro
4	Drs. Mardani, M.Ag Nip. 150 1 239 144/IV/a	Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur'an	Adab	Mandiri	
5	Dra. Hj. Andi Aty Ulleng, M.Pd Nip. 150 043 520 / III/d	Persepsi Siswa Pesantren Babul Khaer Bulukumba Terhadap Eksistensi IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
6	Muh. Suhufi Abdullah, M.Ag. Nip. 150 298 940 / III/a	Peranan Alumni IAIN Dalam Pembangunan Masyarakat (Studi Terhadap Potensi Alumni IAIN Alauddin Makassar)	Dakwah	Mandiri	Prof.Dr.Hj.Andi Rasdiyanah
7	Dra. Murniati Sirajuddin, M.Pd. Nip. 150 218 493 /III/c	Beberapa Problem Bagi Upaya Peningkatan Mutu Alumni IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
8	Dra. A. Syahraeni, M.Ag Nip. 150 246 281 / III/c	Studi Terhadap Persepsi Siswa SMU Dan Agama Di- Kab. Takalar Terhadap Perguruan Tinggi IAIN Alauddin Makassar	Dakwah	Mandiri	
9	Drs. Hadi Dg Mapuna, M.Ag dkk Nip. 150 266 298 / III/c	Persepsi Siswa SLTA Umum Dan Agma Kota Makassar Terhadap IAIN Alauddin dan Pengaruhnya Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke IAIN Alauddin Makassar.	Syariah	Mandiri	

10	Drs. Muh. Shaleh Ridwan, M.Ag Nip. 150 259 442/III/c	Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd Nip. 150 246 414/III/d	Partisipasi Masyarakat Dalam Perwakafan Tanah Milik (Studi Korelasional Antara Pemahaman Dan Sikap Dengan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwakafan Tanah Milik Di Kota Makassar)	Syar'ah	Mandiri	
11						
12	Ahkam Jayadi, S.H./MH Nip. 150 231 530 /IV/b	Drs. H. Ambo Asse, M.Ag Nip. 150 231 412/IV/b	Peranan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan Lingkungan Dari Pencemaran Industri Di Kota	Syarah	Mandiri	
13			Hadis Tentang Basmalah Dan Malar.	Syarah	Mandiri	
14	Drs. Syarifuddin Nip. 150 231 531 /IV/b	Ondeng, M.Ag	Menyimak Kualitas Alumni IAIN Alauddin Dewasa (Evaluasi Atas SDM Alumni pada Instansi-Instansi di Kota Makassar)	Tarbiyah	Mandiri	
15	Dra. Djuwairrah Ahmad, M.Pd Nip. 150 271 887/III/c		The Application of SQ3R Technique (Survey, Question, Read, Recall, and Review) and TPT (Three Phase Technique) in Teaching Authentic Reading Materials to the Fifth Semester Students of English Department of Tarbiyah Faculty of IAIN Alauddin Makassar	Tarbiyah	Mandiri	
16	Drs. Muh. Yusuf Hidayat, M.Pd Nip. 150 272 386 /III/b		Perbedaan Konsep Diri, Motivasi dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Input SLTA Umum dan Madrasah di IAIN Alauddin Makassar	Tarbiyah	Mandiri	Prof. Dr. Hj. Andi Rasyidah
17	Dra. St. Syamsuddin, M.Pd Nip. 150 259 833/III/b		Manajemen Pesantren (Kasus 3 Pesantren di Kabupaten Gowa)	Tarbiyah	Mandiri	Prof. Dr. H.A. Rahman Goleg
18	Drs. Sabaruddin Garaeng, MA Nip. 150 202 883 /IV/c		Problematika Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Kota Makassar	Tarbiyah	Mandiri	
19	Drs. Borahima, M.Pd Nip. 150 083 197/IV/a		Strategi Penyampaian Isi Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pada Mts. Aisyiyah Sungepunasa	Tarbiyah	Mandiri	
20	Drs. M. Hajar Nonci dkk Nip. 150 245 507/ III/ d		Opini Siswa Sekolah Lanjutan Atas Umum Dan Agama Terhadap IAIN Sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Agama di Kab. Singaj	Ushul	Mandiri	Drs. H.M. Saleh Puthena
21	Drs. Muhammad Ramli, M.Si Nip. 150 231 418 /IV/b		Persepsi Siswa Sekolah Lanjutan Atas Umum dan Agama di Kab. Sidrap Terhadap IAIN Alauddin Makassar	Ushul	Mandiri	

22	Drs. H. Nihaya M Nip. 150 196 130/TV/c	Sejarah Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Nurcholis Majid)	Ushul	Mandiri
23	Prof. Dr. H. Abd. Rahman Gattang dkk Nip. 150 020 216 / IV/d	Minat Tamatan Madrasah Aliyah Dan Pesantren Memasuki IAIN Alauddin Makassar	Tarbiyah	Kolektif
24	Staf Pusat penelitian, dkk	Intensitas Perkuliahan dan Kualitas Penyajiannya di IAIN Alauddin Makassar	Puslit	Kolektif
25	Drs. Darussalam S., M. Ag. Nip. 150 243 651/ III/d dkk	Peran Alumni IAIN Dalam Memotivasi Masyarakat Beragama Di Kota Makassar	Syariah	Kolektif

Makassar, 25 April 2002

REKTOR, *[Signature]*

PROF. DR. H. ABD. MUJIN SALIM

NIP. 150 036 706



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA**

JALAN URIP SUMOHARJO NO. 269 TLP. (0411) 453046,444884  
MAKASSAR (90231)

154.

Nomor : 070/2085 -III/BKB-SS.

Makassar, 22 Mei 2002.

Sifat : Biasa.

Lampiran :

Kepada.

Perihal : Izin Penelitian.

Yth. KAKANWIL DEPAG PROP. SULSEL  
Yth. KAKANDEP AGAMA KOTA MAKASSAR  
DI - MAKASSAR

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN No.40 Tahun 2002.  
tentang peneliti

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Drs.MUKHTAR LUTFI, M.Pd.

Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 6 Juli 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen Faku. Syarif'ah IAIN Alauddin

Alamat : Jl. Skarda N. II/10 Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi Saudara

dengan Judul "Partisipasi Masyarakat dalam Perwakafan Tanah Milik  
(Studi Korelasional antara Pemahaman terhadap sikap dengan Partisipasi  
masyarakat dalam perwakafan tanah milik di Kota Makassar  
Selama

6 (enam) bulan 22 Mei s/d 30 oktober 2002

Pengikut/peserta : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut  
dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor / Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat- Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar Copy hasil "Peneltian" kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

Demikian untuk mendapatkan perhatian

**Tembusan :**

1. Dirjen Bina Kesbang Depdagri dan Otda
2. Gubernur Sulawesi Selatan (Sbg. Lap.) di Makassar
3. Pangdam VII W.r.b di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Ka Pusat Penelitian IAIN Alauddin
6. Sdr. Drs. Mukhtar lutfi , M.Pd.
7. Arsip
- 8.

